

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENGAWASAN
INTERNAL PROGRAM KOTA TANPA KUMUH
(KOTAKU) DI DINAS PEKERJAAN UMUM
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

SKRIPSI

Oleh :

**NONA SINTIA
NPM 1503100075**

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi Pembangunan**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh:

Nama : NONA SINTIA
NPM : 1503100075
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari, Tanggal : Kamis, 14 Maret 2019
Waktu : 07.45 s.d. Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd (.....)
PENGUJI II : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP (.....)
PENGUJI III : Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP (.....)

PANITIA UJIAN

Ketua



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP



Sekretaris



Dr. ZULFAHMI, M.IKom

Unggul | Cerdas | Terpercaya

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

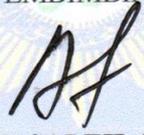
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai bimbingan diberikan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk dipertahankan dalam ujian skripsi oleh:

Nama : NONA SINTIA
NPM : 1503100075
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) DI KANTOR DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN ACEH TAMIANG

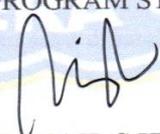
Medan, 14 Maret 2019

PEMBIMBING



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP

DISETUJUI OLEH
KETUA PROGRAM STUDI



NALIL KHAIRIAH, S.IP., M.Pd



DEKAN

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP

Unggul | Cerdas | Terpercaya

SURAT PERNYATAAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan ini saya NONA SINTIA, NPM 1503100075, menyatakan dengan sesungguhnya:

1. Saya yang menyadari bahwa memalsukan Karya Ilmiah dalam segala bentuk dilarang oleh undang-undang termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan esuatu, atau memplagiat, menciplak dan mengambil karya orang lain adalah tindak kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya dan tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, ciplakan dari karya orang lain, atau karya plagiat, ciplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia tanpa mengajukan banding menerima sanksi berupa:

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai ujian saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar sarjana yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan pemberian ijazah dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 02 Maret 2019

METERAI
TEMPEL
6000
ENAM RIBU RUPIAH
1g Menyatakan
NONA SINTIA



ABSTRAK

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) DI KANTOR DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN ACEH TAMIANG

Oleh:

NONA SINTIA

1503100075

Dipilihnya program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) sebagai objek penelitian karena program ini adalah salah satu program yang sedang berjalan di Kabupaten Aceh Tamiang sampai saat ini tetapi belum tercapai sesuai dengan target yang telah ditentukan. Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) ini bertujuan untuk membangun infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan pengawasan internal yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum terhadap pelaksanaan program Kotaku di Kabupaten Aceh Tamiang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara. Sedangkan teknik analisis data menggunakan deskriptif analisis kualitatif demi hasil yang didapatkan melalui penelitian ini. Hasil penelitian menyampaikan bahwa pelaksanaan pengawasan internal program Kotaku yang dilakukan oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum sudah efektif hanya saja tata cara pelaksanaan yang mereka lakukan kurang sempurna dan tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Sehingga pihak Dinas Pekerjaan Umum lebih perlu memperhatikan tata cara pelaksanaan pengawasan yang baik dan benar yang sesuai dengan prosedur yang ada agar pelaksanaan pengawasan berjalan dengan baik dan berdampak baik juga terhadap pelaksanaan program Kotaku.

Kata Kunci : Efektivitas, Pengawasan Internal, Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Maha suci Allah SWT yang menganugrahkan setiap orang yang menjalani hidup didunia ini yang berbeda. Maha indah karunia-Nya telah memberikan masing-masing orang dengan potensi yang beraneka rupa. Puji dan syukur alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas karunia, hidayah dan anugerah-Nya penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di Universitas Sumatera Utara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Administrasi Publik Konsentrasi Pembangunan dengan selesainya skripsi ini dengan judul EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) DI KANTOR DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN ACEH TAMIANG. Salawat beriring salam juga penulis persembahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kabar tentang pentingnya ilmu bagi kehidupan di dunia dan di akhirat kelak.

Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari beberapa pihak, baik secara moril maupun materil. Untuk ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: teristimewa dan paling utama serta paling tercinta dan tersayang kepada orang tua saya yaitu Ayahanda **Zulkifli ZA** dan Ibunda **Suratni** yang telah mendukung dan membantu saya baik dari segi moril maupun materil. Yang selalu mendukung, memotivasi serta doa restu kepada saya untuk terus maju mencapai cita-cita saya. Mereka adalah sumber inspirasi dan motivasi saya dalam melangkah kedepan untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Karena dengan doa dan tetesan keringatmu

wahai orang tua ku, aku bisa menggapai cita-cuku hari ini telah ku dapati apa yang aku impikan yang telah ku tempuh dengan cucuran keringat, keyakinan dan kesabaran, engkau telah mengantarkanku ke hari depan. Sebuah karya kecil ini dari perjalananku, aku persembahkan juga kepada abang-abangku Willy Wirguna, David Andri dan M.eric dan Kakak iparku Novitalia yang selalu memberikan dukungan, doa dan semangat kepadaku demi keberhasilan ku disaat hidup nelangsa. Dalam penyelesaian pendidikan saya sampai akhir penulisan skripsi ini ku mohon Ya Allah semoga mereka selalu dalam lindungan-Mu.

Serta penulis juga mengucapkan terima kasih setulusnya kepada:

1. Bapak Drs.Agussani,M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr.Arifin Saleh, S.Sos.,MSP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara dan selaku dosen pembimbing saya yang telah banyak membantu dan memberikan arahan serta waktunya.
3. Ibu Nalil Khairiah,S.Ip.,M.Pd selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara.
4. Dosen dan seluruh staff pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhamadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan.

5. Seluruh pegawai staff biro yang telah banyak membantu dalam semua urusan penulis mulai dari perkuliahan sampai akhir pengerjaan skripsi penulis.
6. Bapak Edwin Latifurrahman Sahputra, SH selaku Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang yang telah memberikan waktunya kepada penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan informasinya.
7. Para narasumber lainnya yang disertakan dalam penelitian ini yaitu pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan pelaksana program Kotaku.
8. Kepada yang teruntuk dan terkhusus Ahmad Nazman Mairza Erde S.Ikom yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada sahabat sahabat serta teman seperjuangan di IAN B sore konsentrasi pembangunan Berlian Ratna Bulan, Mutia Putri, Arini Larasati, Rafika Duri, dan Fuadi yang sama-sama berjuang untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada sahabat satu kosan Lusi Lestari, Yaashinta Rahma Naura, Dinda Aulia, Eva Oktaviana, Chyntia Medina, Desi Risma, Mei Selly, Cut Farhana, Dinda Mayang serta sahabat di kampung Elva Fayanti Adha dan Ayu Adelina yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis untuk penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu secara langsung maupun tidak langsung yang memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian dan penyusunan skripsi ini, penulis

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga mendapat balasan dari Allah SWT serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulis duduk diperkuliahan sampai akhir penyelesaian skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi untuk kedepannya.

Medan, 13 Febuari 2019

NONA SINTIA

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar belakang masalah.....	1
1.2 Rumusan masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat penelitian.....	5
1.5 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II URAIAN TEORISTIS.....	7
2.1 Pengertian Efektivitas.....	7
2.2 Pengertian Pelaksanaan.....	7
2.3 Pengertian Pengawasan.....	8
2.4 Pengertian Pengawasan Internal.....	15
2.5 Pengertian program.....	22
2.6 Pengertian Program Kotaku.....	22
2.7 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat.....	28
2.8 Pengertian Sarana dan Prasarana.....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
3.1 Jenis Penelitian.....	31
3.2 Kerangka Konsep.....	31
3.3 Defenisi Konsep.....	32
3.4 Kategorisasi	34
3.5 Narasumber.....	34
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.7 Tenik Analisis Data.....	35
3.8 Waktu Penelitian.....	36
3.9 Letak dan Lokasi Penelitian.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	52
4.1 Hasil Penelitian.....	52
4.2 Pembahasan.....	60

BAB V Penutup	64
5.1 Simpulan	64
5.2 Saran.....	64

Daftar pustaka
Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1. Luas Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang Menurut Kecamatan.....	37
Tabel 3.2. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Kabupaten Aceh Tamiang 2016- 2017.....	38
Tabel 3.3. Keadaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Jabatan dan Golongan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.....	39
Tabel 3.4. Keadaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Kegenderan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang.....	39

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 Kerangka Konsep.....	32
Gambar 3.2 Struktur Organisasi.....	51

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	: Daftar Riwayat Hidup
Lampiran II	: Daftar Wawancara
Lampiran III	: SK-1 Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
Lampiran IV Pembimbing	: SK-2 Surat Keterangan Penetapan Judul Skripsi dan
Lampiran V	: SK-3 Permohonan Seminar Proposal Skripsi
Lampiran VI	: SK-4 Undangan Seminar Proposal Skripsi
Lampiran VII	: Sk-5 Berita Acara Bimbingan Skripsi
Lampiran VIII	: Surat Pengantar Izin Penelitian Mahasiswa
Lampiran IX	: Surat Balasan Izin Melakukan Penelitian Mahasiswa

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Program Kotaku merupakan program yang sedang berjalan di Kota Kualasimpang Kabupaten Aceh Tamiang , yang bertugas mengawasi program Kotaku tersebut adalah Kantor Dinas Pekerjaan Umum di bidang Cipta Karya sedangkan petugas bidang Cipta Karya yang mengawasinya adalah kepala dinas sehingga kepala dinas harus selalu mengawasi bagaimana kinerja petugas bidang Cipta Karya dalam mengawasi program Kotaku agar program tersebut berjalan dengan baik sesuai dengan yang di rencanakan dan petugas bidang Cipta Karya juga harus selalu memberikan laporan tentang hasil perjalanan program Kotaku sehingga kepala dinas mengetahui perkembangan program tersebut . Dinas Pekerjaan Umum bidang Cipta Karya bertugas untuk mengawasi dengan baik dan teliti program kotaku yang bersifat teknis seperti pelaksanaan di lapangan, waktu pelaksanaannya dan sebagainya . Program Kotaku (Kota Tanpa Kumuh) adalah program yang dilaksanakan secara nasional di 269 kota/kabupaten di 34 provinsi yang menjadi “*platform*” atau basis penanganan kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan, termasuk dari pemerintah pusat, provinsi, kota/kabupaten, pihak donor, swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Kotaku bermaksud untuk membangun sistem yang terpadu untuk penanganan kumuh, dimana pemerintah daerah memimpin dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya, serta mengedepankan partisipasi masyarakat.

Kotaku diharapkan menjadi “platform kolaborasi” yang mendukung penanganan kawasan permukiman kumuh seluas 38.431 Ha yang dilakukan secara bertahap diseluruh Indonesia melalui pengembangan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat, penguatan kelembagaan, perencanaan, perbaikan infrastruktur dan pelayanan dasar ditingkat kota maupun masyarakat, serta pendampingan teknis untuk mendukung tercapainya sasaran RPJMN 2015-2019 yaitu pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 persen. Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dijelaskan bahwa Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat, sedangkan Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian (UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman)

Dari pengertian tersebut dapat dirumuskan karakteristik perumahan kumuh dan permukiman kumuh dari aspek fisik sebagai berikut :

1. Merupakan satuan entitas perumahan dan permukiman;
2. Kondisi bangunan tidak memenuhi syarat, tidak teratur dan memiliki kepadatan tinggi;
3. Kondisi sarana dan prasarana tidak memenuhi syarat. Khusus untuk bidang keciptakaryaan, batasan sarana dan prasarana adalah sebagai berikut keteraturan bangunan, jalan lingkungan, penyediaan air bersih/minum,

pengelolaan persampahan, pengelolaan air limbah, pengamanan kebakaran, dan ruang terbuka publik.

Karakteristik fisik tersebut selanjutnya menjadi dasar perumusan kriteria dan indikator dari gejala kumuh dalam proses identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Selain karakteristik fisik, karakteristik non fisik pun perlu diidentifikasi guna melengkapi penyebab kumuh dari aspek non fisik seperti perilaku masyarakat, kepastian bermukim, kepastian berusaha.

Tujuan program adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan. Program ini dilaksanakan di Dinas Pekerjaan Umum dan Bapeda, yang secara teknis program tersebut diawasi oleh Dinas Pekerjaan Umum karena kewenangan untuk program tersebut yang berwenang untuk mengawasinya adalah Dinas Pekerjaan Umum.

Pengawasan merupakan suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan (Makmur:2011)

Dalam pelaksanaannya program Kotaku yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang kurang berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan dan rencana yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Hal ini disebabkan karena faktor masih rendahnya kualitas sumber daya manusia yang terampil dalam pelaksanaan

program yang telah ditetapkan sehingga tidak sesuai dengan rencana yang diharapkan (infektif). Faktor lain yang menghambat pelaksanaan program Kotaku adalah masih kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk bekerja sama menjaga lingkungan dan fasilitas yang telah diberikan oleh pemerintah dalam pelaksanaan program itu. Oleh karena itu perlu adanya pengawasan secara teknis oleh lembaga Pekerjaan Umum bidang Cipta Karya terhadap sumber daya manusia dan dalam pelaksanaan program tersebut .

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang bina marga, cipta karya, pengairan dan tata ruang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi melakukan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas di bidang bina marga, cipta karya, pengairan dan tata ruang, melakukan pemantauan, evaluasi dan laporan.

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai kewenangan melaksanakan pengawasan pengendalian teknis di bidang bina marga, cipta karya , pengairan dan tata ruang . Sedangkan program Kotaku tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum di bidang Cipta karya dan diawasi langsung oleh pegawai Pekerjaan Umum yang bertugas di bidang Cipta Karya.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk mengetahui seberapa efektif pengawasan dari Dinas Pekerjaan Umum terhadap program Kotaku yang ada di Kabupaten Aceh Tamiang. Untuk itu penulis melakukan penelitian yang dituangkan dalam skripsi berjudul **“Efektivitas Pelaksanaan**

Pengawasan Internal Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang”.

1.2 Perumusan Masalah

Perumusan masalah adalah hal yang sangat penting untuk dibahas karena masalah di sini merupakan tantangan yang akan dicari jalan keluar ataupun diatasi dengan berbagai alternatif sehingga dapat menjadi tujuan yang diinginkan.

Berdasarkan latar belakang masalah maka, penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini yakni bagaimanakah efektivitas pelaksanaan pengawasan internal di Dinas Pekerjaan Umum terhadap program Kotaku di Kabupaten Aceh Tamiang?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan salah satu hal yang akan dicapai dalam suatu kegiatan dan setiap penelitian haruslah memiliki arah tujuan yang jelas. Tanpa adanya arah tujuan yang jelas, maka penelitian tidak akan berjalan dan mendapat hasil sebagaimana yang diharapkan.

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan pengawasan internal yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum terhadap pelaksanaan program Kotaku di Kabupaten Aceh Tamiang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai bahan masukan sekaligus evaluasi bagi penulis agar dapat menjadi referensi baru dalam bidang pengawasan.
- b. Untuk mengembangkan keilmuan penulis untuk menyelesaikan masalah melalui karya ilmiah.
- c. Sebagai bahan referensi bagi pengembang atau peneliti selanjutnya.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : URAIAN TEORITIS

Menguraikan pengertian dan konsepsi tentang efektivitas, pengertian pelaksanaan, pengertian pengawasan, pengertian pengawasan internal, pengertian program, pengertian program Kotaku dan pengertian pemberdayaan masyarakat.

BAB III : METODE PENELITIAN

Menguraikan tentang jenis penelitian, definisi konsep, kerangka konsep, narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, lokasi dan waktu penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menguraikan tentang penyajian data dan analisis data hasil penelitian.

BAB V : PENUTUP

Menguraikan tentang simpulan dan saran.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Pengertian Efektivitas

Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankannya (Otenk:2008)

Efektivitas juga berhubungan dengan masalah bagaimana pencapaian tujuan atau hasil yang diperoleh, kegunaan atau manfaat dari hasil yang diperoleh, tingkat daya fungsi unsur atau komponen, serta masalah tingkat kepuasan pengguna/client (Muhidin:2009)

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu pemanfaatan sumber daya sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu dalam mencapai tujuan atau hasil yang diperoleh sesuai dengan tujuan yang diinginkan dengan hasil yang memuaskan.

2.2 Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan : 2001)

Pelaksanaan adalah orang yang mengerjakan atau melakukan rencana yang telah disusun (Poerwadarminta : 2003). Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan (Usman : 2002)

Lembaga Administrasi Negara RI merumuskan pelaksanaan adalah upaya setiap pegawai atau setiap anggota organisasi berkeinginan dan berusaha mencapai tujuan yang telah direncanakan.

Dari defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan adalah keseluruhan proses dalam upaya yang dilakukan oleh setiap pegawai atau setiap anggota organisasi yang berkeinginan dan berusaha mencapai tujuan yang diharapkan.

2.3 Pengertian Pengawasan

Pengawasan merupakan proses pemantauan kinerja karyawan berdasarkan standart untuk mengukur kinerja, memastikan kualitas atas penilaian kinerja dan pengambilan informasi yang dapat dijadikan umpan balik pencapaian hasil yang dikomunikasikan ke para karyawan (Mathis:2006)

Pengawasan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan secara terus menerus atau berkesinambungan untuk mengamati, memahami, dan menilai setiap pelaksanaan kegiatan tertentu sehingga dapat dicegah atau diperbaiki kesalahan atau penyimpangan yang terjadi (Ihyaul:2009)

Pengawasan adalah suatu bentuk pola pikir dan pola tindakan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada seseorang atau beberapa orang yang diberikan tugas untuk dilaksanakan dengan menggunakan berbagai sumber daya yang tersedia secara baik dan benar, sehingga tidak terjadi kesalahan dan penyimpangan yang sesungguhnya dapat menciptakan kerugian oleh lembaga atau organisasi yang bersangkutan (Makmur:2011)

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai (Yahya:2006)

Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan aparat atau unit bertindak atas nama pimpinan organisasi dan bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh pimpinan organisasi untuk menilai kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan (Fathoni : 2006)

Pengawasan adalah segala kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar penyelenggaraan suatu kegiatan tidak menyimpang dari tujuan serta rencana yang telah digariskan (Sumarsono : 2010)

Secara umum pengertian pengawasan adalah proses untuk menjamin segala kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan. Lebih lengkapnya definisi pengawasan adalah usaha yang disusun secara sistematis untuk menentukan acuan kerja pada proses perencanaan sistem feedback informasi, mengkomparasi hasil kerja dengan acuan kerja, menganalisis terjadinya penyimpangan, dan segera mengambil langkah perbaikan yang dibutuhkan untuk keterjaminan penggunaan sumber daya organisasi/perusahaan secara efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.

Berdasarkan pengertian pengawasan tersebut pada dasarnya kegiatan pengawasan dilaksanakan untuk mengetahui secara segera terkait penyimpangan, penyalahgunaan, pemborosan, maupun problematika organisasi yang lain, kemudian dilakukan langkah koreksi dan perbaikan terhadap permasalahan tersebut

2.3.1 Fungsi Pengawasan

Pengertian fungsi pengawasan pada dasarnya adalah untuk menilai, menganalisis, dan memberi rekomendasi serta menyampaikan mengenai laporan yang berkaitan dengan bidang pekerjaan dari sebuah departemen atau organisasi/perusahaan yang sudah diteliti. Aktivitas ini juga termasuk ke dalam fungsi kepemimpinan dalam organisasi.

Secara lebih terperinci berikut fungsi pengawasan yang dapat diketahui:

- a. Pengawasan menilai apakah setiap elemen/unit dalam organisasi menjalankan kebijakan dan aturan yang sesuai dengan tugas masing-masing.
- b. Untuk menilai surat maupun laporan apakah telah mendeskripsikan aktivitas yang aktual dengan tepat dan teliti.
- c. Sebagai penilai terkait pengontrolan aktivitas manajemen apa sudah memadai dan dilaksanakan dengan efektif.
- d. Menganalisis apakah aktivitas yang telah dikerjakan secara efektif meraih sasaran yang ditentukan sebelumnya.
- e. Meneliti apakah aktivitas dijalankan seefisien mungkin.

2.3.2 Tujuan Pengawasan

Aktivitas pengawasan memiliki berbagai macam tujuan dalam manajemen organisasi, diantaranya:

- a. Menjamin keberjalanan pekerjaan sesuai dengan perencanaan, kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.
- b. Melakukan koordinasi antar aktivitas yang dilaksanakan.

- c. Menghindari terjadinya penyalahgunaan dan pemborosan anggaran.
- d. Melakukan penjamin akan terwujudnya kepuasan konsumen terhadap produk yang dihasilkan (apabila perusahaan nirbala)
- e. Membangun kepercayaan konsumen/publik pada kepemimpinan organisasi/perusahaan/pemerintahan.

2.3.3 Jenis-Jenis Pengawasan

- a. Pengawasan Fungsional. Kelembagaan negara dengan aktivitas yang begitu rumit dan kompleks, maka sangat dibutuhkan jenis pengawasan yang bersifat fungsional dengan menggunakan tenaga kerja manusia yang memiliki pengetahuan khusus dan pekerjaan khusus di bidang pengawasan. Yang menjadi pemahaman terhadap pengawasan fungsional sebenarnya telah melekat kepada lembaga di mana secara fungsional memiliki tugas, pokok dan fungsi di bidang pengawasan.
- b. Pengawasan Masyarakat. Penyelenggaraan pengawasan masyarakat ditunjukkan kepada pemerintah sebagai penyelenggaraan negara agar tidak terjadi penyalahgunaan sumber daya yang dimiliki pemerintah atas nama negara. Secara realitas bahwa yang paling banyak melakukan penyalahgunaan sumber daya negara adalah penguasa, terutama penyelenggaraan pemerintah, misalnya manipulasi pajak, keuangan dan sebagainya.
- c. Pengawasan Administrasi. Tujuan pengawasan administrasi dalam kelembagaan publik agar pendataan dan pembagian atau perdistribusian suatu kegiatan atau pekerjaan dilakukan dengan berdasarkan keadilan dan

sesuai dengan kemampuan masing-masing anggota kelembagaan. Oleh sebab itu, untuk menciptakan kondisi seperti ini, maka sangat dibutuhkan penerapan atau pelaksanaan pengawasan secara administrasi supaya kegiatan kelembagaan dapat berjalan sesuai harapan.

- d. Pengawasan Teknis. Untuk dapat memberikan maksimalisasi hasil pekerjaan teknis sesuai dengan bidang pekerjaan teknis itu sendiri, sehingga dapat menciptakan hasil yang maksimal untuk memenuhi kesejahteraan anggota kelembagaan maupun anggota masyarakat.
- e. Pengawasan Pimpinan. Setiap lembaga terdapat dua unsur posisi manusia di dalamnya: pertama, unsur sebagai pimpinan dan kedua sebagai unsur yang dipimpin. Sebagai unsur yang dipimpin berfungsi untuk melaksanakan kegiatan atau pekerjaan yang diberikan oleh unsur pemimpin, sedangkan sebagai unsur pimpinan memiliki tugas untuk melakukan pengawasan kepada yang dipimpinnya agar pekerjaan yang dilaksanakan tersebut dapat berjalan dengan baik dan mencegah terjadinya kemungkinan pemborosan yang dapat berakibat merugikan anggota kelembagaan itu sendiri. Tanpa adanya pengawasan pimpinan yang dilakukan secara sungguh-sungguh dapat dikatakan para pelaksana kegiatan akan tidak dapat disiplin kerja.
- f. Pengawasan Barang. Pengawasan barang berarti suatu usaha yang dilakukan secara sadar untuk menjamin keamanan suatu barang agar memberikan manfaat kepada pelaksanaan tugas kelembagaan yang memiliki hak tentang barang tersebut.

- g. Pengawasan Jasa. Yang dimaksud disini adalah suatu imbakian yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang yang menjadi anggota kelembagaan, jasa dari pihak ketiga atau sebaliknya, tidak akan berjalan sebagaimana mestinya juga tidak ada pengawasan yang dilakukan secara baik dan tegas, apalagi hasil jasa itu akan memberikan nilai yang sangat berharga pada seseorang atau beberapa orang dalam kehidupannya.
- h. Pengawasan Internal. Kelembagaan negara memiliki sub kelembagaan antara lain kelembagaan eksekutif, yudikatif, auditif dan semacamnya, pengawasan yang dibentuk dalam kelembagaan itu sendiri untuk mengamankan dalam rangka memperlancar penyelenggaraan tugas, untuk kelembagaan inilah yang dimaksud pengawasan internal. Pengawasan internal harus dilaksanakan dengan baik agar tujuan yang diharapkan oleh seluruh manusia dalam kelembagaan dapat terwujud dengan sebaik-baiknya dan untuk menunjang kesejahteraan seluruh anggota kelembagaan yang bersangkutan.
- i. Pengawasan Eksternal. Pengawasan eksternal yaitu pengawasan yang dilakukan secara legalitas oleh lembaga pengawasan yang di luar sub kelembagaan tertentu, misalnya negara indonesia lembaga yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan keuangan negara adalah Badan Pengawasan Keuangan (BPK).

Sedangkan jenis-jenis pengawasan dapat ditinjau dari 3 segi yaitu:

a. Pengawasan dari segi waktu

Pengawasan dari segi waktu dapat dilakukan secara preventif dan secara repensif. Alat yang dipakai dalam pengawasan adalah perencanaan budget, sedangkan pengawasan secara repensif alat budget dan laporan, pengawasan preventif lebih dimaksud sebagai, “pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan”.

b. Pengawasan dilihat dari segi obyektif

Pengawasan dilihat dari segi obyektif ialah pengawasan terhadap produksi dan sebagainya. Ada juga yang mengatakan karyawan dari segi obyek merupakan pengawasan secara administratif dan pengawasan operatif. Contohnya pengawasan anggaran, inspeksi, pengawasan order dan pengawasan kebijaksanaan.

c. Pengawasan dari segi subyek

Pengawasan dari segi subyek terdiri dari pengawasan intern dan pengawasan ekstern.

Berdasarkan beberapa konsep di atas, maka yang dimaksud dengan pengawasan pada penelitian ini merupakan suatu kegiatan yang berusaha untuk mengendalikan agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan rencana dan memastikan apakah tujuan organisasi tercapai.

2.3.4 Tata Cara Pengawasan

1. Menetapkan Standar

Karena perencanaan merupakan tolak ukur untuk merancang pengawasan, maka secara logis bahwa langkah pertama dalam proses pengawasan adalah menyusun rencana. Perencanaan disini adalah menentukan standar kerja.

2. Mengukur Kinerja

Langkah kedua dalam pengawasan adalah mengukur atau mengevaluasi kinerja yang dicapai terhadap standar yang telah ditentukan.

3. Memperbaiki Penyimpangan

Proses pengawasan tidak lengkap jika tidak ada tindakan perbaikan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, proses pengawasan terbagi atas 4 tahapan yaitu:

- a. Menentukan standar atau dasar bagi pengawasan
- b. Mengukur pelaksanaan
- c. Membandingkan pelaksanaan dengan standar dan temukanlah perbedaan jika ada
- d. Memperbaiki penyimpangan dengan cara-cara tindakan yang tepat

2.4 Pengertian Pengawasan Internal

Pengertian pengawasan internal dalam arti luas dapat dibagi dua yaitu pengawasan administratif dan pengawasan akuntansi. Pengawasan internal yang baik merupakan alat yang dapat membantu pimpinan lembaga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Melalui pengawasan internal yang efektif, pimpinan lembaga juga dapat menilai apakah kebijakan dan prosedur yang

ditetapkan telak dilaksanakan dengan baik sehingga tujuan lembaga dapat tercapai.

Jenis pengawasan menurut ruang lingkupnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pengawasan dari dalam (*Internal Control*) dan pengawasan dari luar (*Eksternal Control*). Pengawasan dari dalam (*Internal Control*) berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan yang terbentuk didalam organisasi itu sendiri. Aparat/unit pengawasan ini bertindak atas nama pimpinan organisasi yang bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperluka untuk menilai kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan organisasi.

Pengawasan internal meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian, dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Makmur:2011). Dari defenisi pengawasan internal terdapat beberapa konsep dasar yaitu:

a. Pengawasan Internal merupakan proses

Pengawasan internal merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu. Pengawasan internal itu sendiri bukan merupakan suatu tujuan. Pengawasan internal merupakan suatu rangkaian tindakan yang bersifat pervasif dan menjadi bagian tidak terpisahkan, bukan hanya sebagai tambahan dari infrastruktur entitas.

b. Pengawasan Internal dijalankan oleh orang

Pengawasan intern bukan hanya terdiri dari pedoman kebijakan dan formulir, namun dijalankan oleh orang dari setiap jenjang organisasi yang mencakup dewan komisaris, manajemen dan personel lain.

c. Pengawasan Internal ditujukan untuk mencapai tujuan yang saling berkaitan: pelaporan keuangan, kepatuhan dan operasi.

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 2011 pasal 1, pengawasan internal adalah seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi yang bertujuan untuk mengendalikan kegiatan, mengamankan harta dan aset, terselenggaranya laporan keuangan yang baik, meningkatkan efektivitas dan efisiensi, dan mendeteksi secara dini terjadinya penyimpangan dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari defenisi-defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan internal dalam suatu lembaga merupakan fungsi staf yang melakukan penilaian secara bebas atau tidak memihak dalam suatu organisasi untuk memeriksa dan mengevaluasi seluruh aktivitas dan melaporkan hasil pekerjaannya tersebut kepada manajemen sebagai suatu jasa pelayanan, dan bertanggung jawab penuh kepada manajemen.

Satuan Pengawasan Internal merupakan unit organisasi yang dibentuk untuk membantu manajemen melakukan pengawasan, pengendalian yang independen serta memberikan saran-saran dan perbaikan untuk meningkatkan mutu lembaga. Usaha untuk menjamin pelaksanaan tujuan sangatlah penting untuk menghindari

kesalahan-kesalahan dan kecurangan informasi yang menyebabkan kerugian bagi pihak lembaga.

2.4.1 Tujuan Pengawasan Internal

Pengawasan dilaksanakan untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan untuk menentukan kebijakan dan tindakan apa yang perlu dilakukan yang menyangkut pelaksanaan tugas, tingkah laku aparat dan kinerja aparat.

2.4.2 Indikator-Indikator Pengawasan Internal

a. Pengamatan

Pengamatan adalah aktifitas yang dilakukan makhluk cerdas, terhadap suatu proses atau object dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.

b. Inpeksi Teratur dan Langsung

Inpeksi teratur dan langsung merupakan salah satu alat control manajemen yang bersifat klasik tetapi masih relevan dan secara luas sudah banyak diterapkan dalam upaya menemukan masalah yang dihadapi dilapangan termasuk untuk memperkirakan besarnya resiko.

c. Pelaporan Lisan dan Tertulis

Suatu bentuk penyampaian berita, keterangan, pemberitahuan ataupun pertanggungjawaban baik secara lisan maupun tertulis dari bawahan kepada

atasan sesuai dengan hubungan wewenang dan tanggung jawab yang ada diantara mereka.

d. Evaluasi Pelaksanaan

Suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan dan menemukan kualitas (nilai dan arti) dari sesuatu, berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu dalam rangka pembuatan keputusan.

e. Diskusi antara manajer dan bawahan

Pertukaran pendapat dan gagasan dalam bentuk lisan untuk mencari sebuah solusi dari sebuah masalah dan mendapat kesepakatan antara atasan dan bawahan.

2.4.3 Fungsi dan Tugas Pengawasan Internal

Fungsi pengawasan dalam membantu manajemen meliputi tiga hal, yaitu:

- a. Meningkatkan kinerja organisasi
- b. Memberikan opini atas kinerja organisasi
- c. Mengarahkan manajemen untuk melakukan koreksi atas masalah pencapaian kinerja yang ada. Fungsi ini dilakukan dengan cara memberikan informasi yang dibutuhkan manajemen secara cepat dan memberikan nilai tambah bagi peningkatan kinerja penyelenggara, baik secara internal maupun eksternal.

Sedangkan menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2011 Pasal 4 tentang Satuan Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional bahwasanya fungsi pengawasan internal adalah

1. Penyusunan program pengawasan
2. Pengawasan kebijakan dan program
3. Pengawasan pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang milik negara
4. Pendampingan dan review laporan keuangan
5. Pemberian saran dan rekomendasi
6. Penyusunan laporan pengawasan
7. Pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan

Berdasarkan keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi pengawasan adalah untuk menilai setiap unit-unit dalam melakukan kebijaksanaan dan prosedur yang menjadi tanggung jawab masing-masing untuk menilai apakah pengendalian manajemen sudah cukup memadai dan dilaksanakan secara efektif, untuk meneliti apakah kegiatan sudah terlaksana secara efektif yaitu mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, meneliti apakah kegiatan sudah dilaksanakan secara efisien.

2.4.4 Tugas Pengawasan Internal

Tugas dan tanggung jawan satuan pengawasan interna yakni:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan
2. Memastikan atau mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal
3. Melakukan evaluasi dan validitasi terhadap sistem

2.4.5 Komponen Pengawasan Internal

Lima komponen pengawasan internal yang saling berhubungan sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)
2. Penilaian Resiko (*Risk Assessment*)

3. Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*)
4. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)

Struktur pengawasan internal harus dirancang sedemikian rupa sehingga sesuai dengan keadaan dan kebutuhan lembaga yang bersangkutan. Oleh sebab itu dibutuhkan penelitian terhadap seluruh aspek untuk menghindari rendahnya mutu dalam langkah pencapaian tujuan.

2.4.6. Unsur Pokok Pengawasan Internal

Unsur pokok pengawasan internal terdiri dari:

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas
2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya
3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi
4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya

2.4.7. Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan Internal

Pengawasan rutin/reguler dilaksanakan dalam bentuk pengawasan langsung, yaitu dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap para pejabat di setiap bidang dengan metode interview dan pemeriksanaan dokumen, yang meliputi tindakan sebagai berikut:

1. Memeriksa program kerja
2. Menilai dan mengevaluasi hasil/kegiatan pelaksanaan program kerja
3. Memberikan saran-saran untuk perbaikan

Pegawasan rutin/reguler dilakukan dalam bentuk pemeriksaan, yaitu dengan mekanisme pengamatan yang dilakukan dari dekat dengan cara mengadakan perbandingan antara sesuatu yang telah atau akan dilaksanakan dengan sesuatu yang seharusnya dilaksanakan menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

2.5 Program

Program merupakan pernyataan yang berisi kesimpulan dari beberapa harapan atau tujuan yang saling bergantung dan saling terkait, untuk mencapai suatu sasaran yang sama. Biasanya suatu program mencakup seluruh kegiatan yang berada dibawah unit administrasi yang sama, atau sasaran-sasaran yang saling bergantung dan saling melengkapi, yang semuanya harus dilaksanakan secara bersamaan dan berurutan (Muhaimin,dkk:2009)

Program merupakan salah satu komponen dalam suatu kebijakan, program merupakan upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan (Rohman:2009). Program adalah rancangan mengenai asas serta usaha (Binanto:2009)

Dengan demikian dari defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa program adalah unsur pertama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan proses untuk menghasilkan suatu output yang diinginkan oleh pembuat program.

2.6 Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) adalah satu dari sejumlah upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia dan mendukung “Gerakan 100-0-100”, yaitu 100 persen akses universal

air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak. Arah kebijakan pembangunan Dirjen Cipta Karya adalah membangun sistem, memfasilitasi pemerintah daerah dan memfasilitasi komunitas (berbasis komunitas). Program Kotaku akan menangani kumuh dengan membangun platform kolaborasi melalui peningkatan peran pemerintah dan partisipasi masyarakat.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 mengamanatkan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan melalui penanganan kualitas lingkungan permukiman yaitu peningkatan kualitas permukiman kumuh, pencegahan tumbuh kembangnya permukiman kumuh baru, dan penghidupan yang berkelanjutan. Pada tahun 2016 masih terdapat 35,291 Ha permukiman kumuh perkotaan yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia sesuai hasil perhitungan pengurangan luasan permukiman kumuh perkotaan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya. Kondisi tersebut diperkirakan akan terus mengalami penambahan apabila tidak ada bentuk penanganan yang inovatif, menyeluruh, dan tepat sasaran (Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019)

Permukiman kumuh masih menjadi tantangan bagi pemerintah kabupaten/kota, karena selain merupakan masalah disisi lain ternyata merupakan salah satu pilar penyangga perekonomian kota. Mengingat sifat pekerjaan dan skala pencapaian, diperlukan kolaborasi beberapa pihak antara pemerintah mulai tingkat pusat sampai dengan tingkat kelurahan/desa, pihak swasta, masyarakat,

dan pihak terkait lainnya. Oleh karena itu, salah satu langkah mewujudkan sasaran RPJMN 2016-2021 yaitu kota tanpa permukiman kumuh di tahun 2021, Direktorat Jenderal Cipta Karya menginisiasi pembangunan platform kolaborasi melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

Program Kotaku mendukung pemerintah daerah sebagai nahkoda dalam penanganan permukiman kumuh dan menyiapkan masyarakat sebagai subjek pembangunan melalui revitalisasi peran Badan Keswadayaan Masyarakat. Program Kotaku dilaksanakan di 34 provinsi, yang terbesar di 269 kabupaten/kota pada 11.067 desa/kelurahan. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kumuh yang ditetapkan oleh kepala daerah masing-masing kabupaten/kota, permukiman kumuh yang berada dilokasi sasaran program Kotaku adalah seluas 23.656 Hektare.

Sebagai implementasi percepatan penanganan kumuh, program Kotaku akan melakukan peningkatan kualitas, pengelolaan serta pencegahan timbulnya permukiman kumuh baru, dengan kegiatan-kegiatan pada entitas desa/kelurahan, serta kawasan kabupaten/kota. Kegiatan penanganan kumuh ini meliputi pembangunan infrastruktur serta pendampingan sosial dan ekonomi untuk keberlanjutan kehidupan masyarakat yang lebih baik dilokasi permukiman kumuh.

Tahapan pelaksanaan program Kotaku adalah pendataan. Lembaga masyarakat di desa/kelurahan yang bernama Badan/Lembaga Keswadayaan Masyarakat (BKM/LKM) sudah melakukan pendataan kondisi awal indikator kumuh di desa/kelurahan masing-masing. Data tersebut diintegrasikan antara

dokumen perencanaan masyarakat dan dokumen perencanaan kabupaten/kota untuk menentukan kegiatan prioritas mengurangi permukiman kumuh dan mencegah timbulnya permukiman kumuh baru. Yang nantinya akan dilaksanakan baik oleh masyarakat atau oleh pihak lain, yang memiliki keahlian dalam pembangunan infrastruktur pada entitas kawasan dan kota.

Program Kotaku ini telah disosialisasikan kepada pemerintah daerah pada 27 April 2016 bertempat di Jakarta. BKM akan menjadi faktor yang dapat mempercepat tercapainya permukiman yang layak huni dan berkelanjutan karena sudah berpengalaman dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan penanggulangan kemiskinan. BKM ini “direvitalisasi” dari sebelumnya yang terfokus pada penanggulangan kemiskinan, kini berorientasi ke penanganan kumuh.

Sumber pembiayaan program Kotaku berasal dari pinjaman luar negeri lembaga donor, yaitu Bank Dunia (*World Bank*), *Islamic Development Bank*, dan *Asian Infrastructure Investment Bank*. Selain itu kontribusi pemerintah daerah dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun swadaya masyarakat, yang akan menjadi satu kesatuan pembiayaan demi mencapai target peningkatan kualitas permukiman kumuh yang diharapkan.

Tujuan umum program ini adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung perwujudan permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan. Dalam tujuan umum tersebut terkandung dua maksud, pertama memperbaiki akses masyarakat terhadap infrastruktur dan fasilitas pelayanan di

permukiman kumuh perkotaan dan yang kedua adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perkotaan melalui pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, berbasis masyarakat, dan partisipasi pemerintah daerah. Penjabaran atas tujuan program Kotaku adalah memperbaiki akses masyarakat terhadap infrastruktur permukiman sesuai dengan 7+1 indikator kumuh, penguatan kapasitas pemerintah daerah untuk mengembangkan kolaborasi dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*), dan memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan penghidupan berkelanjutan (*sustainable livelihood*).

Indikator tersebut adalah :

1. Bangunan Gedung
 - a. Ketidakteraturan dalam hal dimensi, orientasi, dan bentuk;
 - Kepadatan tinggi tidak sesuai dengan ketentuan dalam rencana tata ruang;
 - Ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis sistem struktur, pengamanan petir, penghawaan, pencahayaan, sanitasi dan bahan bangunan.
2. Jalan Lingkungan
 - Kondisi permukaan jalan yang tidak dapat dilalui kendaraan dengan aman dan nyaman;
 - Lebar jalan yang tidak memadai;
 - Kelengkapan jalan yang tidak memadai;
3. Penyediaan Air Minum

- Ketidaktersediaan akses air minum;
 - Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu;
 - Tidak terpenuhinya kualitas air minum sesuai standart kesehatan;
4. Drainase Lingkungan
- Ketidakmampuan mengalirkan limpasan air hujan;
 - Menimbulkan bau;
 - Tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan;
5. Pengelolaan Air Limbah
- Ketidaktersediaan sistem pengelola air limbah;
 - Ketidatersediaan kualitas buangan sesuai standart yang berlaku;
 - Tercemarnya lingkungan sekitar;
6. Pengelolaan persampahan
- Ketidaktersediaan sistem pengelola persampahan;
 - Ketidaktersediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan;
 - Tercemarnya lingkungan sekitar oleh sampah;
7. Pengamanan Kebakaran
- Ketidaktersediaan sistem pengamanan secara aktif dan pasif;
 - Ketidaktersediaan pasokan air untuk pemadaman yang memadai;
 - Ketidaktersediaan akses untuk mobil kebakaran;
8. Ruang Terbuka Publik
- Ketidaktersediaan lahan untuk ruang terbuka hijau (RTH);
 - Ketidaktersediaan lahan untuk ruang terbuka non-hijau/ruang terbuka publik (RTP)

2.7 Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses dalam bingkai usaha yang memperkuat apa yang lazim disebut *community self-reliance* atau kemandirian (Huraerah : 2008)

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses di mana masyarakat (khususnya yang kurang memiliki akses terhadap pembangunan) didorong untuk meningkatkan kemandirian dalam mengembangkan perikehidupan mereka (Surjono&Nugroho : 2008)

Pemberdayaan adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan dinamis secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara evolutif dengan keterlibatan semua potensi (Suhendra : 2006)

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses di mana masyarakat yang berkesinambungan dinamis secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi untuk meningkatkan kemandirian dalam mengembangkan perikehidupan mereka.

2.7.1 Jenis-jenis Pemberdayaan Masyarakat

a. Sikap Radikal

Sikap radikal adalah jenis pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dalam upaya membentuk segala pembangunan dalam masyarakat melalui sistem kekuatan. Sistem ini bisa dipaksakan sebagai sistem paksaan yang bersifat mengikat kepada seluruh masyarakat.

b. Sikap Kebersamaan

Sikap kebersamaan adalah jenis pemberdayaan masyarakat yang dilakukan mengedepankan kebersamaan dalam masyarakat. Kebersamaan ini dilakukan dengan langkah akomodasi dari setiap kepentingan serta golongan dalam masyarakat.

c. Pendekatan Dengan Sistem Gagasan

Jenis pemberdayaan masyarakat ini adalah sistem pemberdayaan yang mengedepankan pada gagasan sistem ini secara tidak langsung stimulasi dari pada memberikan power kepada powerless. Keadaan ini bisa dikomdir masyarakat melalui syarat interaksi sosial dalam masyarakat yang baik dan akhirnya menimbulkan integrasi kepentingan bersama.

2.7.2 Tahap- Tahap Pemberdayaan Masyarakat

Sebagaimana disampaikan dimuka bahwa di atas bahwa proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap, tahap-tahap yang harus dilalui tersebut adalah meliputi:

- a. Tahap penyadaran dan tahap pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan kapasitas diri.
- b. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.

- c. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.

2.8 Pengertian Sarana dan Prasarana

Secara umum yang dimaksud sarana dan prasarana adalah seperangkat alat yang digunakan untuk suatu kegiatan, alat tersebut bisa berupa alat utama atau alat yang membantu proses kegiatan, sehingga tujuan dari kegiatan tersebut dapat tercapai. Sebenarnya sarana dan prasarana bukan hanya meliputi seperangkat alat atau barang saja tapi bisa juga suatu tempat atau ruangan untuk proses kegiatan.

Dalam pengadaannya sarana dan prasarana bisa dengan cara membeli, membuatnya sendiri, maupun menerima bantuan orang lain. Tentunya dalam penggunaan sarana dan prasarana adalah untuk memanfaatkan segala jenis alat atau barang yang sesuai dengan keperluan. Dalam penggunaannya tentu harus mempertimbangkan beberapa hal, seperti tujuan yang ingin dicapai dengan menggunakan sarana dan prasarana tersebut, karakteristik penggunaannya, hingga adanya sarana dan prasarana yang menjadi penunjang.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam menentukan penelitian, terlebih dahulu diketahui jenis penelitian yang digunakan untuk mengetahui gambaran yang jelas didalam yang digunakan untuk mengetahui gambaran yang jelas didalam penelitian tersebut, sehingga memudahkan untuk melakukan langkah selanjutnya dalam proses analisis data.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif, yaitu suatu metode yang berusaha mencari dan memperoleh informasi mendalam dari pada luas atau banyaknya informasi.

Data deskriptif adalah sebuah indikator bagi norma-norma dan nilai-nilai kelompok serta kekuatan sosial lainnya yang menyebabkan perilaku manusia itu sendiri. Sedangkan metode penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian.

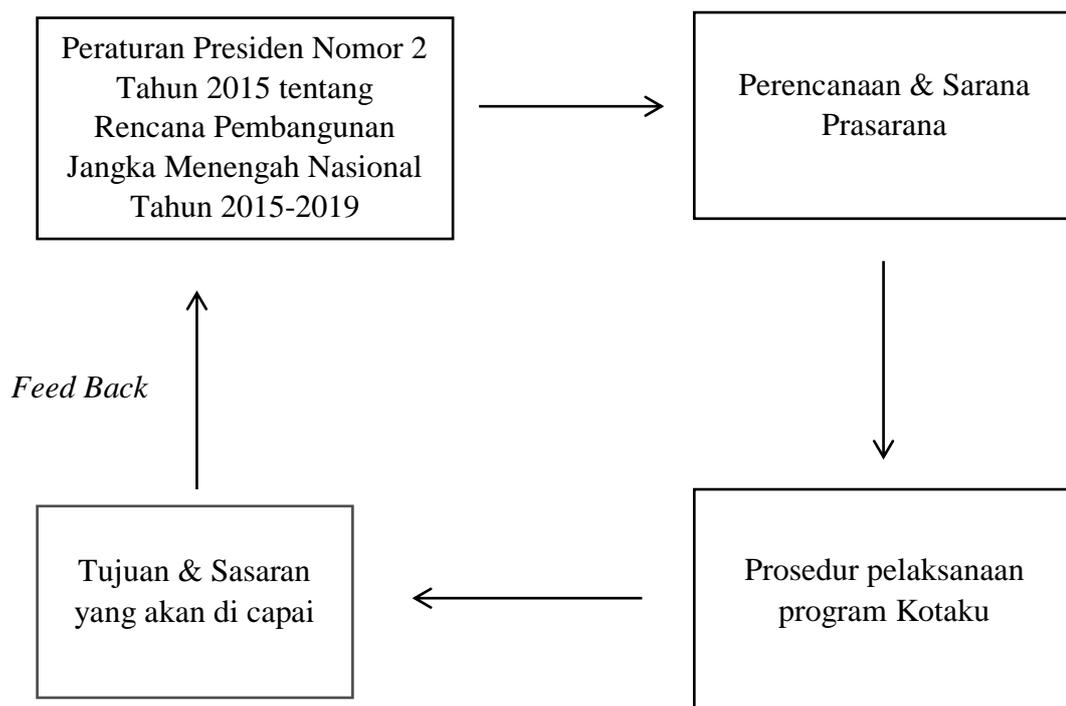
3.2 Kerangka Konsep

Kerangka konsep yang akan dideskripsikan dan digambarkan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pengawasan internal pihak Dinas Pekerjaan Umum terhadap program Kotaku dalam membuat program tersebut berjalan dengan baik.

Sebagai dasar pijakan yang jelas dan pengembangan toeri, maka kerangka konsep yang digambarkan dan disusun dalam sebuah model teoritis seperti apa yang digambarkan dalam bagan pada halaman berikut ini.

Gambar 3.1

Kerangka Konsep Penelitian



3.3 Definisi Konsep

Konsep adalah satuan arti yang memiliki sejumlah objek yang mempunyai ciri yang sama. Orang yang memiliki konsep mampu mengadakan abstraksi terhadap objek-objek yang dihadapi sehingga objek-objek ditempatkan dalam golongan tertentu (Bahri:2008)

Dari uraian di atas digunakan konsep pemikiran untuk mempersempit pengertian yang akan diteliti.

1. Efektivitas merupakan suatu kondisi atau keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya efek atau akibat yang dikehendaki dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana atau peralatan yang digunakan, disertai dengan kemampuan yang dimiliki adalah tepat, sehingga tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan.
2. Pelaksanaan adalah usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana yang telah ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.
3. Pengawasan adalah proses untuk menjamin segala kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan.
4. Pengawasan Internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang ataupun badan yang ada terdapat di dalam lingkungan unit organisasi/lembaga yang bersangkutan.
5. Program adalah unsur pertama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan.
6. Program Kotaku adalah program perencanaan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh nasional yang merupakan upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam rangka memberdayakan masyarakat dan memperkuat peran pemerintah daerah (pemkab/pemko) dalam rangka

pengecahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh diperkotaan

7. Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu proses di mana masyarakat yang berkesinambungan dinamis secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi untuk meningkatkan kemandirian dalam mengembangkan perikehidupan mereka.

3.4 Kategorisasi Penelitian

Kategorisasi adalah upaya membuat identifikasi atau memilah-milah unit secara jelas (Mustaqim:2017)

Adapun kategorisasi dalam penelitian ini adalah:

- a. Adanya tujuan dan target sasaran pelaksanaan pengawasan oleh Dinas Pekerjaan Umum terhadap program Kotaku.
- b. Adanya tata cara pelaksanaan (prosedur) dalam pelaksanaan pengawasan .
- c. Adanya pelaksanaan program Kotaku sesuai dengan perencanaannya.
- d. Adanya sarana dan fasilitas kerja dalam pelaksanaan program Kotaku.

3.5 Narasumber

Adapun narasumber dalam penelitian ini sebanyak 4 orang yakni:

- a. 2 orang pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang terdiri atas:
 1. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum : Edwin Latifurrahman Sahputra, SH
 2. Kepala satker PIP atau Kabid Cipta Karya : Wan Zulham, ST

b. 2 orang pelaksana Program Kotaku terdiri atas perangkat desa:

1. Kepala Desa (BKM) : M.Husen Daud
2. Masyarakat (KSM) : Mustika

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan dua cara yakni:

a. Data primer

Data yang dilakukan secara langsung pada lokasi yang telah ditentukan. Langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara yaitu mengajukan beberapa pertanyaan terhadap responden yang berkaitan dalam penelitian dengan cara wawancara yaitu proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.

b. Data Sekunder

Pengumpulan data yang relevan dengan permasalahan yang ada yang diteliti dan diperoleh dari buku atau penelitian kepustakaan, untuk mendukung penelitian ini.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses memilih dari beberapa sumber maupun permasalahan yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan (Sedarmayanti:2011)

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah memaparkan situasi atau peristiwa. Penelitian ini bersifat deskriptif, cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif, proses dan makna lebih ditonjolkan.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lain (Sugiyono:2013)

Metode deskriptif ini merupakan metode yang bertujuan untuk mengetahui sifat serta hubungan yang lebih mendalam antara dua variabel dengan cara mengamati aspek-aspek tertentu secara lebih spesifik untuk memperoleh data tersebut diolah, dianalisis, dan diproses lebih lanjut dengan dasar teori-teori yang telah dipelajari sehingga data tersebut ditarik sebuah kesimpulan.

3.8 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan mulai bulan Desember 2018 sampai bulan Februari 2019. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang.

3.9 Letak dan lokasi penelitian

Kabupaten Aceh Tamiang terletak antara $03^{\circ}53'18,81''$ – $04^{\circ}32'56,76''$ Lintang Utara dan $97^{\circ}43'41,51''$ – $98^{\circ}14'45,41''$ Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata 20 – 700 meter di atas permukaan laut. Pada Tahun 2007, Kabupaten Aceh Tamiang mengalami pemekaran kecamatan sehingga wilayah administrasi menjadi 12 Kecamatan dan 213 kampung. Batas- batas Wilayah Kabupaten Aceh

Tamiang , sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Timur dan Kota Langsa, sebelah Timur dengan Provinsi Sumatera Utara, sebelah Selatan dengan Kabupaten Gayo Lues dan sebelah Barat dengan Kabupaten Aceh Timur dan Kabupaten Aceh Tenggara.

Luas wilayah Kabupaten Aceh Tamiang sebesar 195.702,50 ha, dengan lahan perkebunan perusahaan sebagai lahan terluas yang mencapai 46.817 ha, diikuti lahan perkebunan rakyat mencapai 44.460 ha. Kecamatan terluas di Kabupaten Aceh Tamiang adalah Tenggulun dengan luas wilayah sebesar 29.555 ha atau sekitar 15,10 persen dari luas wilayah Kabupaten Aceh Tamiang.

TABEL 3.1

Luas Wilayah Kabupaten Aceh Tamiang Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah	Persentase
1	Tamiang Hulu	194,63	9,95
2	Bandar Pusaka	252,37	12,90
3	Kejuruan Muda	124,48	6,36
4	Tenggulun	295,55	15,10
5	Rantau	51,71	2,64
6	Kota Kuala Simpang	4,48	0,23
7	Seuruway	188,49	9,63
8	Bendahara	132,53	6,77
9	Banda Mulia	48,27	2,47
10	Karang Baru	139,45	7,13
11	Sekerak	257,95	13,18
12	Manyak Payed	267,11	13,65
	Kabupaten	1.957,02	100,00

Sumber : BPS/ Kabupaten Aceh Tamiang Dalam Angka, 2018

Tabel 3.2

**Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Kabupaten Aceh Tamiang 2016-
2017**

No	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	
		2016	2017
1	Tamiang Hulu	19.400	19.665
2	Bandar Pusaka	12.841	12.995
3	Kejuruan Muda	35.939	36.504
4	Tenggulun	18.003	18.210
5	Rantau	37.132	37.709
6	Kota Kuala Simpang	20.438	20.765
7	Seruway	26.672	27.081
8	Bendahara	20.794	21.087
9	Banda Mulia	11.835	11.986
10	Karang Baru	40.796	41.401
11	Sekerak	6.733	6.824
12	Manyak Payed	32.388	32.780
Aceh Tamiang		282.921	287.007

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tamiang

3.10 Data Pegawai Negeri Sipil Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang

Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang adalah Pegawai Negeri Sipil dan Honorer yang ada di lingkungan dinas tersebut yang berjumlah 302 orang, yang kalau dirinci berdasarkan Jabatan , golongan/ruang kepangkatan dan kegenderan adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Keadaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Jabatan dan Golongan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Golongan	Jumlah	Presentase
IV.a	3	0,03%
III.d	10	0,11%
III.c	14	0,16%
III.b	16	0,18%
III.a	17	0,20%
II.d	7	0,08%
II.c	11	0,13%
II.b	3	0,03%
II.a	4	0,05%
Jumlah	85	100%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang Tahun 2018

Adapun keadaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Kegenderan sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.4

Keadaan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Kegenderan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang

Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
Laki-Laki	67	0,79%
Perempuan	18	0,21%
Jumlah	85	100%

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang 2018

2.11 Visi dan Misi dan Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang

- a. Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun 2015-2019 adalah :

“Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Yang Handal Dalam Mendukung Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

- b. Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah:

1. Mempercepat pembangunan infrastruktur sumber daya air termasuk sumber daya maritim untuk mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan dan kedaulatan energi, guna menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik dalam rangka kemandirian ekonomi;
2. Mempercepat pembangunan infrastruktur jalan untuk mendukung konektivitas guna meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan pelayanan sistem logistik nasional bagi penguatan daya saing bangsa di lingkup global yang berfokus pada keterpaduan konektivitas daratan dan maritim;
3. Mempercepat pembangunan infrastruktur permukiman dan perumahan rakyat untuk mendukung layanan infrastruktur dasar yang layak dalam rangka mewujudkan kualitas hidup manusia indonesia sejalan dengan prinsip infrastruktur untuk semua;
4. Mempercepat pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat secara terpadu dari pinggiran di dukung industri

konstruksi yang berkualitas untuk keseimbangan pembangunan antar daerah, terutama di kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan perdesaan, dalam kerangka NKRI;

5. Meningkatkan tata kelola sumber daya organisasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung fungsi manajemen meliputi perencanaan yang terpadu, pengorganisasian yang efisien, pelaksanaan yang tepat, dan pengawasan yang ketat;
- c. Sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah:
1. Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman dan penganggaran.
 2. Meningkatnya ketahanan air.
 3. Meningkatnya kemantapan jalan nasional.
 4. Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman.
 5. Meningkatnya penyediaan dan pembiayaan perumahan.
 6. Meningkatnya kapasitas dan pengendalian kualitas konstruksi nasional.
 7. Meningkatnya pengendalian dan pengawasan.

2.12 Tugas Pokok Fungsi

Dalam menjalankan segala sktivitasnya, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai tugas pokok untuk menjalankan dan membantu

bupati dalam menyelenggarakan tugas urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan dan strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- b. Pelaksanaan kebijakan dan strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- c. Perumusan dan pelaksanaan program kerja dan kegiatan urusan wajib Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan program dan kegiatan urusan wajib Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- e. Pelaksanaan tata kelola data, informasi, administrasi kepegawaian, dan kearsipan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- f. Pelaksanaan tata usaha dan tata kelola barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya

2.13 Uraian Tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman;
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman;
4. Pelaksanaan administrasi dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretaris Dinas

Sekretaris mempunyai tugas mengoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan.

Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

1. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan;
2. Penyusunan rencana program kerja dan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan;
3. Penyiapan peraturan perundang-undangan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman sesuai

dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;

4. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
5. Penyelenggaraan pengelolaan barang /kekayaan milik negara/daerah di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan;
6. Pengelolaan data dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
7. Pengoordinasian penyusunan laporan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan;
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
9. Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Sekretaris membawahi:

1. Sub bagian Perencanaan
2. Sub bagian Keuangan dan Aset
3. Sub bagian Kepegawaian dan Umum

Setiap sub bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris:

1. Sub bagian Perencanaan, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan menyusun rencana program kerja, rencana anggaran dan pelaporan.

Sub bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja dan rencana anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
 - b. Penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
 - c. Penyiapan bahan dan penyusunan laporan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
 - d. Penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
2. Sub bagian Keuangan dan Aset, mempunyai tugas menyiapkan bahan dan menyelenggarakan administrasi keuangan dan penatausahaan aset.
Sub bagian Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyiapan bahan koordinasi dan penyelenggaraan administrasi dan penatausahaan keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
 - b. Pemeliharaan dan penyimpanan bukti dan dokumen keuangan
 - c. Penyiapan bahan dan penyusunan pelaporan kegiatan dan pertanggung jawaban keuangan
 - d. Pelaksanaan penatausahaan dan pengelolaan aset
 3. Sub bagian Kepegawaian dan Umum, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan kepegawaian, ketatalaksanaan, penatausahaan surat menyurat, urusan rumah tangga, dan perlengkapan.

Sub bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, dan keamanan kantor serta kenyamanan kerja
- b. Menghimpun dan mengelola bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan lain-lain
- c. Fasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan
- d. Pengelolaan urusan perjalanan dinas dan keprotokolan
- e. Pengurusan hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan dan lain-lain
- f. Perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai
- g. Penyiapan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU)

Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpinan tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya yaitu:

1. Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga mempunyai tugas membantu Kepala Dinas merumuskan, menyusun, mengoordinasikan, menyelenggarakan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang bina marga.

Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang bina marga
- b. Pemberian petunjuk teknis dibidang bina marga
- c. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang bina marga
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang bina marga
- e. Pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan serta pengembangan dibidang bina marga

Bidang Bina Marga, membawahi:

- a. Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kebijakan dibidang perencanaan jalan dan jembatan.
- b. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kebijakan dibidang pembangunan jalan dan jembatan.
- c. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kebijakan dibidang pemeliharaan jalan dan jembatan.

2. Bidang Sumber Daya Air

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas membantu Kepala Dinas merumuskan, menyusun, mengoordinasikan, menyelenggarakan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang sumber daya air.

Bidang Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang sumber daya air
- b. Pemberian petunjuk teknis dibidang sumber daya air
- c. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang sumber daya air
- d. Pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan, serta pengembangan dibidang sumber daya air
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang sumber daya air
- f. Penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan dibidang sumber daya air

Bidang Sumber Daya Air, membawahi:

- a. Seksi Perencanaan dan Pengendalian, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kebijakan dibidang perencanaan dan pengendalian.
- b. Seksi Operasi dan Pemeliharaan, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi,

pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kebijakan dibidang operasi dan pemeliharaan.

- c. Seksi Irigasi dan Sungai, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kebijakan dibidang irigasi dan sungai.

3. Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas membantu Kepala Dinas merumuskan, menyusun, mengoordinasikan, menyelenggarakan, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dibidang cipta karya.

Bidang Cipta Karya menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan penyusunan kebijakan dibidang cipta karya
- b. Pemberian petunjuk teknis dibidang cipta karya
- c. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan dibidang cipta karya
- d. Pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan serta pengembangan dibidang cipta karya
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang cipta karya
- f. Penyusunan laporan pelaksanaan kebijakan cipta karya

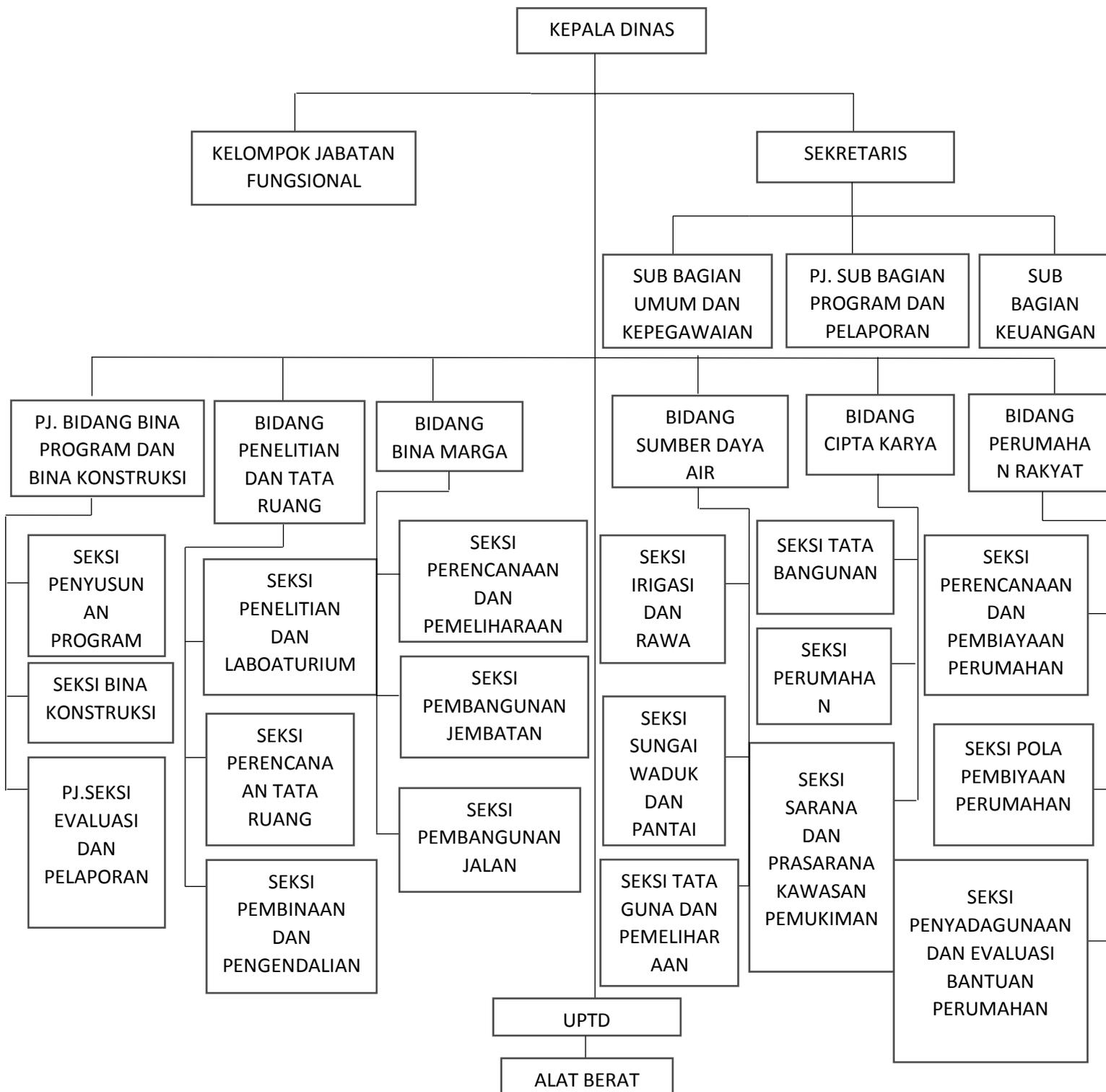
Bidang Cipta Karya, membawahi:

- a. Seksi Perencanaan, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kebijakan dibidang perencanaan.
- b. Seksi Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kebijakan dibidang air bersih dan penyehatan lingkungan.
- c. Seksi Tata Bangunan dan Permukiman, mempunyai tugas membantu Kepala Bidang menyiapkan bahan perumusan, penyusunan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kebijakan dibidang tata bangunan dan permukiman

Gambar 3.2

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Kabupaten Aceh Tamiang



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Adanya tujuan dan target sasaran pelaksanaannya pengawasan internal

Tujuan dilaksanakannya pengawasan internal sangat penting dalam suatu lembaga karena pengawasan internal dapat membuat suatu lembaga tersebut lebih baik dan bermutu, Seperti yang dikatakan Bapak Edwin Latifurrahman Sahputra selaku Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang, berdasarkan wawancara beliau mengatakan bahwa tujuan dilaksanakannya pengawasan internal adalah agar pegawai melaksanakan tugas nya secara efektif dan efisien sesuai dengan yang direncanakan dan ditargetkan, dan agar terpatuhinya kebijakan dan perundang-undangan yang telah ditentukan. Serta sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi atasan untuk menentukan apa yang perlu dilakukan menyangkut pelaksanaan tugas, tingkah laku pegawai serta kinerja pegawai dinas pekerjaan umum kabupaten aceh tamiang. Dengan adanya pengawasan internal yang dilakukan sekarang maka para pegawai melaksanakan tugas nya sesuai dengan rencana dan ketentuan kebijakan dan perundang-undangan yang berlaku, serta dapat mengendalikan administrasi secara tertib sebagaimana mestinya dan pegawai melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Sedangkan menurut Bapak Wan Zulham selaku Kabid Cipta Karya dan Kepala Satker PIP berdasarkan hasil wawancara beliau mengatakan bahwa tujuan dilakukannya pengawasan internal adalah agar Kepala Dinas mengetahui bagaimana hasil kerja para

bawahannya dan sejauh mana hasil kerja bawahannya apakah sudah sesuai dengan tugasnya masing-masing atau tidak dan apakah para bawahannya sudah melaksanakannya secara efektif atau tidak. Dan yang telah dihasilkan dengan adanya pengawasan internal kinerja para pegawai menjadi lebih baik dan para pegawai melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien sesuai dengan yang telah direncanakan dan ditentukan sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

Sedangkan tujuan dilaksanakannya pengawasan terhadap program Kotaku sangat berpengaruh dalam pelaksanaan program Kotaku yang sedang berjalan di Kabupaten Aceh Tamiang, karena tujuan dilakukannya pengawasan adalah untuk menjamin keberjalanan pekerjaan sesuai dengan perencanaan, kebijakan dan prosedur yang ditetapkan serta menghindari terjadinya penyalahgunaan dan pemborosan anggaran, senada dengan yang dikatakan Bapak M.Husen Daud selaku Kepala desa perdamaian dan selaku BKM dalam pelaksanaan program Kotaku di desa Perdamaian, beliau mengatakan tujuan dilakukannya pengawasan adalah agar program tersebut berjalan dengan baik sesuai dengan yang diinginkan dan yang direncanakan serta menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, pengawasan sangat perlu dilakukan dalam pelaksanaan suatu program atau pekerjaan lainnya karena jika ada pengawasan program tersebut akan berjalan dengan teratur, dan pengawasan yang telah dilakukan oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum bidang Cipta Karya sudah maksimal dan pihak Dinas Pekerjaan Umum sudah mulai rutin melakukan pengawasan langsung ke lapangan dari pada sebelumnya. Dan tujuan pelaksanaan pengawasan terhadap program Kotaku menurut ibu Mustika selaku KSM pelaksanaan program Kotaku di desa

perdamaian, beliau mengatakan tujuan dilakukannya pengawasan adalah untuk selalu mengawasi pengerjaan, pembangunan yang dilakukan oleh warga, dan pengawasan sangat perlu dilakukan karena suatu pekerjaan yang diselenggarakan dalam target yang ditentukan maka sangat lah perlu dilakukan pengawasan agar pekerjaan tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan sampai saat ini hasil pengawasan yang dilakukan oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum sudah baik dan mereka sudah melakukan tugas mereka yang seharusnya.

Dari hasil wawancara tersebut disimpulkan bahwa dengan adanya pelaksanaan pengawasan internal membuat para pegawai melakukan tugasnya dengan baik dan efektif sesuai dengan kebijakan dan aturan yang telah ditentukan sedangkan dengan adanya pengawasan terhadap program Kotaku membuat program yang sedang dilaksanakan berjalan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan karena setiap program atau pekerjaan sebaiknya dilakukan pengawasan agar tercapai sesuai dengan yang di rencanakan.

4.1.2. Adanya tata cara pelaksanaan (prosedur) dalam pelaksanaan pengawasan internal

Dalam melaksanakan pengawasan internal terhadap suatu lembaga pasti terdapat tata cara atau prosedur dalam pelaksanaannya seperti yang dikatakan oleh Bapak Edwin Latifurrahman Sahputra selaku Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang, beliau mengatakan bahwa Tata cara pelaksanaan pengawasan internal dengan cara melakukan pemeriksaan rutin setiap bulan terhadap para bawahan baik dibidang cipta karya maupun bidang lainnya dengan metode tatap muka dan pemeriksaan dokumen yang meliputi beberapa objek

seperti memeriksa hasil program kerja pegawai, memeriksa pencapaian target pegawai, memeriksa kendala dan hambatan yang terjadi, menilai hasil kegiatan serta memberikan saran-saran untuk perbaikan. Dan di dalam pengawasan internal terdapat pedoman khusus yang digunakan dan pedoman tersebut telah ditentukan oleh Menteri Pekerjaan Umum. Dan menurut Bapak Wan Zulham selaku Kabid Cipta Karya dan Kepala PIP, beliau mengatakan bahwa tata cara pelaksanaan pengawasan adalah dengan cara dilakukannya pemeriksaan rutin setiap bulan terhadap hasil kerja yang diperoleh oleh para pegawai dengan cara memberikan hasil laporan bulanan kepada Kepala Dinas atau dengan cara rapat bulanan dengan Kepala Dinas dan setiap Kepala Bidang. Dan pedoman khusus yang digunakan sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum.

Sedangkan tata cara atau prosedur pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap program Kotaku juga memiliki cara-cara tertentu seperti yang dikatakan oleh Bapak M.Husen Daud selaku Kepala desa perdamaian dan selaku BKM dalam pelaksanaan program Kotaku di desa Perdamaian, beliau mengatakan tata cara pelaksanaan pengawasan yang dilakukan pihak Dinas Pekerjaan Umum bidang Cipta Karya adalah dengan cara turun langsung kelapangan dan melihat bagaimana hasil kerja yang telah diperoleh oleh pihak desa serta melihat hasil pengeluaran keuangan yang digunakan untuk kebutuhan pelaksanaan program Kotaku, dan ada beberapa yang telah dilakukan oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum seperti sering dilakukannya rapat untuk memberikan arahan kepada pihak desa terhadap pelaksanaan program Kotaku, peran Dinas Pekerjaan Umum adalah sebagai penggerak dalam pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan

permukiman daerah berdasarkan kebutuhan masyarakat dan sasaran yang ingin dicapai.

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan internal di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang dilakukan dengan baik sesuai dengan metode yang telah ditetapkan dan sesuai dengan pedoman yang telah berlaku. Sedangkan dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum bidang Cipta Karya terhadap program Kotaku tidak memiliki metode khusus hanya saja ada waktu tertentu untuk melakukan pengawasan dan tinjauan langsung ke lapangan.

4.1.3. Adanya pelaksanaan program Kotaku sesuai dengan perencanaannya

Pelaksanaan program Kotaku yang dilaksanakan di Kabupaten Aceh tamiang sudah berjalan dengan baik tetapi hanya saja belum tercapai sepenuhnya sesuai dengan target yang di tentukan , yaitu senada dengan yang dikatakan oleh Bapak Edwin Latifurrahman Sahputra selaku Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang, beliau mengatakan pelaksanaan program Kotaku sampai saat ini berjalan lancar walaupun belum 100% selesai tetapi setidaknya hanya tinggal sedikit yang tersisa luas permukiman kumuh dibandingkan dengan luas permukiman kumuh yang sebelumnya, ada beberapa kegiatan yang dilakukan dalam program Kotaku ini seperti pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan desa tersebut. Sampai saat ini untuk tahun 2019 sisa permukiman kumuh di Aceh Tamiang seluas 9,24 ha. Dan menurut Bapak Wan Zulham selaku Kabid Cipta Karya dan Kepala PIP, beliau mengakatan pelaksanaan program Kotaku berjalan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan, dampak dari

program ini sudah mulai terlihat progresnya, salah satu contohnya seperti desa perdamaian sudah mulai kelihatan cantik dan membaik kondisi perkampungannya, walaupun untuk tahun 2019 ini masih ada tersisa desa yang berkawasan kumuh yaitu desa kota lintang yang masih belum terselesaikan, beliau berharap sampai akhir tahun 2019 ini bisa diselesaikan, kegiatan yang diselenggarakan dalam program Kotaku, beliau mengatakan ada sekitar tujuh indikator penanganan kumuh, diantaranya pengaturan tata letak bangunan gedung, drainase, persoalan kebakaran, perbaikan jalan, air bersih, dan limbah sampah. Dalam program Kotaku kegiatan musyawarah sangat penting, karena semua paket pekerjaan bagian dari persetujuan yang ditetapkan oleh masyarakat, namun jika ada perubahan-perubahan dalam penempatan lokasi maka akan menjadi kebijakan bersama dan kepala desa harus mampu menyelesaikan berbagai persoalan yang timbul akibat program Kotaku. hasil presentase yang telah dicapai dalam mengurangi permukiman kumuh, beliau mengatakan bahwa lebih kurang hampir 98% hasil yang telah dicapai, dengan bukti yang awalnya 53,31 ha kawasan kumuh yang ada di Aceh Tamiang yang di antaranya desa sriwijaya, desa perdamaian, desa kota lintang, kota kuala simpang dan desa bukit tempurung dan sekarang hanya tersisa 1 desa yang masih berkawasa kumuh yaitu desa kota lintang seluas 9,24 ha.

Sedangkan menurut Bapak M.Husen Daud selaku Kepala desa perdamaian dan selaku BKM dalam pelaksanaan program Kotaku di desa Perdamaian , pelaksanaan program Kotaku di desa perdamaian dilaksanakan sejak bulan April 2017 , dan pelaksanaan program Kotaku di desa perdamaian sampai saat ini sudah

berjalan dengan lancar bahkan untuk tahun 2019 ini desa perdamaian sudah tidak lagi termasuk ke dalam kriteria permukiman kumuh. Yang sudah dihasilkan selama pelaksanaan program ini berlangsung terlihat nyata seperti saluran air seperti parit yang dibangun sehingga sekarang tidak lagi terjadi banjir jika sedang hujan dan dengan dibangunnya paving blok membuat akses jalanan menjadi baik dan tidak ada lagi lubang-lubang di jalan. Dan menurut ibu Mustika selaku KSM pelaksanaan program Kotaku di desa perdamaian, beliau mengatakan bahwa pelaksanaan program Kotaku di desa ini sudah berjalan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan dan ditargetkan, yang dihasilkan selama program ini dilaksanakan berupa pembangunan parit, pembangunan paving blok, penyediaan bak sampah di setiap dusun yang ada di desa ini.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa program Kotaku yang ada di Aceh Tamiang berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang direncanakan. Ini diiyakan oleh narasumber bahwa program tersebut sudah hampir mencapai target dan hanya menyisakan 1 desa saja seluas 9,24 ha yang masih berkawasan kumuh dan pihak Dinas Pekerjaan Umum dan bidang Cipta Karya akan terus bekerja keras dalam proses pengawasan terhadap program ini agar semua terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

4.1.4. Adanya sarana dan fasilitas kerja dalam pelaksanaan program Kotaku

Dalam pelaksanaan suatu program pasti ada disediakan atau diberikan sarana dan fasilitas dalam pelaksanaannya sebagai alat bantu untuk berjalan nya program tersebut dengan baik, melalui wawancara yang dilakukan dengan Bapak Edwin Latifurrahman Sahputra selaku Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum

Kabupaten Aceh Tamiang, beliau mengatakan sarana dan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah menurut saya sudah termasuk lengkap karena dalam melakukan pengawasan tidak terlalu banyak memerlukan sarana dan fasilitas, sarana dan fasilitas yang diberikan pemerintah hanya berupa mobil sebagai alat transportasi yang digunakan untuk melakukan pengawasan ke lapangan serta sebuah laptop untuk membuat dan mengerjakan surat-menyurat yang berkaitan dengan program Kotaku. Dan sarana dan fasilitas yang diberikan pemerintah sudah digunakan sebaik dan seefektif mungkin. Tetapi menurut Bapak Wan Zulham selaku Kabid Cipta Karya dan Kepala PIP, beliau mengatakan sarana dan fasilitas yang diberikan pemerintah kepada pihak Dinas Pekerjaan Umum khususnya kepada pihak bidang Cipta Karya menurut beliau kurang lengkap karena tidak ada diberikan alat untuk mendokumentasikan hasil lapangan, sarana dan fasilitas yang diberikan pemerintah berupa mobil dan laptop saja sedangkan kami memerlukan kamera untuk mendokumentasikan hasil lapangan. Sarana dan fasilitasnya sudah digunakan secara efektif karena kami hanya menggunakan sarana tersebut hanya untuk kegiatan dan keperluan yang berkaitan dengan program Kotaku saja.

Sedangkan dari hasil wawancara dengan Bapak M.Husen Daud selaku Kepala desa perdamaian dan selaku BKM dalam pelaksanaan program Kotaku di desa Perdamaian, beliau mengatakan bahwa pemerintah tidak memberikan fasilitas tetapi pemerintah hanya memberikan dana dari APBN kepada kepala desa untuk pelaksanaan program Kotaku tersebut, serta untuk membangun infrastruktur dan membeli fasilitas yang dibutuhkan sesuai dengan keadaan desa tersebut.

Pemerintah sering melakukan rapat kepada pihak desa yang bertujuan untuk memberikan arahan serta mengingatkan agar dana yang telah diberikan digunakan dengan efektif dan dengan sebaik mungkin. Dan menurut ibu Mustika selaku KSM pelaksanaan program Kotaku di desa perdamaian, beliau mengatakan bahwa pemerintah tidak ada memberikan sarana atau fasilitas apapun pemerintah hanya memberikan dana APBN saja yang digunakan untuk pelaksanaan program Kotaku seperti untuk membeli bahan atau alat yang diperlukan untuk pelaksanaan pembangunan yang akan dilakukan. Setelah memberikan dana tersebut pemerintah sering memberikan arahan dan mengadakan rapat untuk memberitahukan agar dana tersebut digunakan sebaik mungkin.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa sarana dan fasilitas serta dana yang diberikan oleh pemerintah sudah digunakan dengan baik sesuai dengan keperluannya dan tidak dipergunakan dengan tidak baik maupun digunakan tidak sesuai dengan kebutuhan dan keperluan.

4.2. Pembahasan

Adapun pembahasan dalam penelitian ini sesuai dengan hasil yang telah di dapat peneliti di lokasi penelitian. Tujuan dilaksanakannya pengawasan internal adalah agar pegawai melaksanakan tugas nya secara efektif dan efisien sesuai dengan yang direncanakan dan ditargetkan, dan agar terpatuhinya kebijakan dan perundang-undangan yang telah ditentukan. Serta sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi atas untuk menentukan tindakan apa yang perlu dilakukan untuk pegawai dinas pekerjaan umum kabupaten aceh tamiang. Dengan adanya pengawasan internal yang dilakukan sekarang maka para pegawai melaksanakan

tugas nya sesuai dengan rencana dan ketentuan kebijakan dan perundang-undangan yang berlaku, serta dapat mengendalikan administrasi secara tertib sebagaimana mestinya dan pegawai melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Hal ini diperkuat dengan teori menurut (Makmur:2011) adalah Pengawasan dilaksanakan untuk dapat mengetahui kenyataan yang ada sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan untuk menentukan kebijakan dan tindakan apa yang perlu dilakukan yang menyangkut pelaksanaan tugas, tingkah laku aparat dan kinerja aparat.

Tata cara pelaksanaan pengawasan internal dengan cara melakukan pemeriksaan rutin setiap bulan terhadap para bawahan baik dibidang cipta karya maupun bidang lainnya dengan metode tatap muka dan pemeriksaan dokumen yang meliputi beberapa objek seperti memeriksa hasil program kerja pegawai, memeriksa pencapaian target pegawai, memeriksa kendala dan hambatan yang terjadi, menilai hasil kegiatan serta memberikan saran-saran untuk perbaikan. Dan di dalam pengawasan internal terdapat pedoman khusus yang digunakan dan pedoman tersebut telah ditentukan oleh Menteri Pekerjaan Umum.

Halini diperkuat oleh tata cara pelaksanaan pengawasan internal yang sebenarnya bahwa pengawasan rutin/reguler dilaksanakan dalam bentuk pengawasan langsung, yaitu dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap para pejabat di setiap bidang dengan metode interview dan pemeriksaan dokumen.

Pelaksanaan program Kotaku berjalan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan, dampak dari program ini sudah mulai terlihat progresnya, salah satu contohnya seperti desa perdamaian sudah mulai kelihatan cantik dan membaik

kondisi perkampungannya, walaupun untuk tahun 2019 ini masih ada tersisa desa yang berkawasan kumuh yaitu desa kota lintang yang masih belum terselesaikan, beliau berharap sampai akhir tahun 2019 ini bisa diselesaikan, kegiatan yang diselenggarakan dalam program Kotaku, beliau mengatakan ada sekitar tujuh indikator penanganan kumuh, diantaranya pengaturan tata letak bangunan gedung, drainase, persoalan kebakaran, perbaikan jalan, air bersih, dan limbah sampah. Dalam program Kotaku kegiatan musyawarah sangat penting, karena semua paket pekerjaan bagian dari persetujuan yang ditetapkan oleh masyarakat, namun jika ada perubahan-perubahan dalam penempatan lokasi maka akan menjadi kebijakan bersama dan kepala desa harus mampu menyelesaikan berbagai persoalan yang timbul akibat program Kotaku. Hasil presentase yang telah dicapai dalam mengurangi permukiman kumuh lebih kurang hampir 98% hasil yang telah dicapai, dengan bukti yang awalnya 53,31 ha kawasan kumuh yang ada di Aceh Tamiang yang di antaranya desa sriwijaya, desa perdamaian, desa kota lintang, kota kuala simpang dan desa bukit tempurung dan sekarang hanya tersisa 1 desa yang masih berkawasa kumuh yaitu desa kota lintang seluas 9,24 ha. Hal ini diperkuat dengan tujuan pelaksanaan program Kotaku untuk meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung perwujudan permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan, memperbaiki akses masyarakat terhadap infrastruktur dan fasilitas pelayanan di permukiman kumuh perkotaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perkotaan melalui pencegahan dan peningkatan

kualitas permukiman kumuh, berbasis masyarakat, dan partisipasi pemerintah daerah.

Sarana dan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah kurang memadai dan kurang lengkap tidak sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum bidang Cipta Karya dalam melakukan pengawasan terhadap program Kotaku dan dengan kurangnya sarana dan fasilitas yang tidak memadai itu akan berdampak dengan terhambatnya proses suatu tujuan program Kotaku yang akan dicapai. Hal ini berdasarkan pengertian sarana dan prasarana secara umum yaitu seperangkat alat yang digunakan untuk suatu kegiatan, alat tersebut bisa berupa alat utama atau alat yang membantu proses kegiatan, sehingga tujuan dari kegiatan tersebut dapat tercapai dan sarana dan prasarana bukan hanya meliputi seperangkat alat atau barang saja, tetapi bisa juga berupa suatu tempat atau ruangan untuk proses kegiatan.

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dilakukan maka simpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengawasan internal yang dilakukan oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum sudah terlaksana dan berjalan dengan baik sesuai dengan tugasnya masing-masing dan kebijakan yang berlaku. Dan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap program Kotaku juga sudah berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.
2. Tata cara pelaksanaan pengawasan internal yang dilakukan oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum sudah sesuai dengan prosedur, metode dan pedoman yang telah ditetapkan.
3. Pelaksanaan program Kotaku sudah berjalan dengan baik tetapi belum berhasil 100% sesuai dengan yang telah di targetkan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya
4. Sarana dan fasilitas yang diberikan pemerintah kepada pihak Dinas Pekerjaan Umum untuk melakukan pengawasan terhadap program Kotaku tidak lengkap dan dengan kurangnya sarana dan fasilitas yang tidak memadai itu akan berdampak dengan terhambatnya proses suatu tujuan program Kotaku yang akan dicapai.

4.2. Saran-Saran

Setelah melakukan pembahasan dan menarik simpulan maka beberapa saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada pihak atasan Dinas Pekerjaan Umum untuk tetap mempertahankan sistem pengawasan internal yang baik kepada pegawainya guna untuk menciptakan mutu terbaik terhadap Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Diharapkan kepada masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang yang khususnya desa nya terpilih sebagai salah satu kriteria permukiman kumuh dan mendapatkan program Kotaku untuk harus lebih giat dan lebih bekerja sama dengan pihak Dinas Pekerjaan Umum bidang Cipta Karya dalam pelaksanaan Program Kotaku yang sedang berjalan ini, agar program tersebut dapat cepat tercapai 100% sesuai dengan target yang ditentukan.
3. Diharapkan kepada pihak Dinas Pekerjaan Umum untuk mengajukan proposal atau masukan kepada pemerintah terkait dengan sarana dan fasilitas yang kurang lengkap dan memadai dalam melaksanakan pengawasan terhadap program Kotaku.
4. Diharapkan kepada masyarakat desa perdamaian untuk dapat selalu menjaga desa nya dengan sebaik-baiknya setelah dilakukannya perbaikan dan pembangunan di desa tersebut agar tidak lagi menjadi salah satu kriteria permukiman kumuh.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, S Muhidin, dkk, 2009. *Analisis Korelasi, Regresi, dan Jalur Dalam Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia.
- Bahri. 2008. *Konsep dan Definisi Konseptual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Binanto, Iwan. 2009. *Konsep Dasar Program*. Jakarta: . Elex Media Komputindo.
- Departemen Pendidikan Kebudayaan, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Fathoni, Abdurahmat. 2006. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Rineka Cipta.
- Huraerah, Abu. 2008. *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan*. Bandung: Humaniora.
- Makmur. 2011. *Efektivitas Kebijakan Pengawasan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Mathis, R.L. & Jackson J.H. 2006. *Human Resource Management: Manajemen Sumber Daya Manusia*. Terjemahan Dian Angelia. Jakarta: Salemba Empat.
- Muhaimin, dkk, 2009. *Manajemen Pendidikan*. Jakarta: Kencana.
- Poerwardaminta W.J.S. 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rohman, Arif. 2009. *Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: LaksBang Mediatama.
- Serdamayanti. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil (cetakan kelima)*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Surjono, Agus & Nugroho, Trilaksono. 2008. *Paradigma, Model, Pendekatan Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otonomi Daerah*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Suhendra. 2006. *Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarsono, Sonny. 2010. *Manajemen Keuangan Pemerintah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ulum, Ihyatul. 2009. *Intelectual Capital: Konsep dan Kajian Empiris*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Yahya, Yohannes. 2006. *Pengantar Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Dokumen

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.

Website

<http://www.pengertianku.net/2018/03/.pengertian-sarana-dan-prasarana-serta-contohnya-di-sekitar-kita.htm>

Otenk. 2008. Pengertian Efektivitas dan Landasan Teori Efektivitas
http://www.academia.edu/9702986_ (diakses tanggal 10 April)

Program Kotaku

[_http://kotaku.pu.go.id/view/7607/tamarunang-potret-sukses-menjaga-amanah-antikumuh](http://kotaku.pu.go.id/view/7607/tamarunang-potret-sukses-menjaga-amanah-antikumuh)
(diakses selasa, tanggal 18 desember 2018)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nona Sintia

Tempat/tgl. Lahir : Kuala Simpang, 26 Maret 1998

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama/Bangsa : Islam/Indonesia

Alamat : Dusun Melur, desa Perdamaian. Kecamatan Kota Kuala Simpang
Kabupaten Aceh Tamiang

Anak Ke : 4 (empat) dari 4 (empat) bersaudara

Nama Orang Tua :

Ayah : Zulkifli.ZA

Ibu : Suratni

Alamat : Dusun Melur, desa Perdamaian. Kecamatan Kota Kuala Simpang
Kabupaten Aceh Tamiang

Riwayat Pendidikan :

1. Tahun 2003 - Tahun 2009 : SD Negeri 1 Bukit Tempurung Kec. Kota Kuala Simpang
2. Tahun 2010 - Tahun 2012 : SMP Negeri 1 Kuala Simpang
3. Tahun 2012 - Tahun 2015 : SMA Negeri 1 Kejuruan Muda
4. Tahun 2015 - sekarang : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, 02 Maret 2019

Nona Sintia

HASIL WAWANCARA

Nama : Wan Zulham, ST

Usia : 45 Tahun

Jabatan : Kabid Bidang Cipta Karya

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Laki-Laki

A. Adanya tujuan dan target sasaran pelaksanaannya pengawasan Internal

1. Faktor apa saja yang melatarbelakangi dilaksanakannya pengawasan internal?

Jawab : Faktor nya itu karena masih banyak pekerjaan pegawai yang kurang baik dan tidak berjalan dengan lancar.

2. Mengapa perlu dilakukan pengawasan internal terhadap pegawai Dinas Pekerjaan Umum ?

Jawab : Supaya kepala dinas tau bagaimana hasil kerja pegawai yang ada di sini, apa udah baik atau blum.

3. Bagaimanakah hasil dari pengawasan internal yang dilakukan?

Jawab : hasil nya bagus karena dengan adanya pengawasan internal ini sekarang pegawai udah gak males-malesan lagi.

B. Adanya tata cara (prosedur) dalam pelaksanaan pengawasan internal

1. Bagaimana cara pihak Dinas Pekerjaan Umum melaksanakan pengawasan internal ?

Jawab : Dengan cara kepala dinas melakukan pemeriksaan rutin setiap bulan ke setiap bidang, kasih laporan ke kepala dinas terus juga setiap bulan dibuat rapat bulanan.

2. Apakah metode pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum ?

Jawab : Metode nya ya seperti yang saya bilang di pertanyaan yang barusan.

3. Apakah ada pedoman khusus untuk melaksanakan pengawasan ?

Jawab : iya, ada pedoman nya itu dikasi langsung dari Menteri Pekerjaan Umum.

C. Adanya Pelaksanaan program Kotaku sesuai dengan perencanaannya

1. Apakah program Kotaku sudah terlaksana sesuai dengan yang di rencanakan ?

Jawab : Alhamdulillah udah berjalan baik , udah banyak desa-desa yang mengalami banyak perubahan kayak desa perdamaian ya itu udah cantik udah banyak perbaikan, setiap pelaksanaan Kotaku ini setiap desa itu yang paling berperan itu kepala desa sama warga ya karna dana yang ada itu diberikan langsung ke kepala desa dan yang melakukan pembangunan itu warga-warga disitu.

2. Dalam program Kotaku ini kegiatan apa saja yang diselenggarakan ?

Jawab : kegiatan nya ada 7 indikator kayak pembangunan drainase, perbaikan jalan, drainase, limbah sampah, air bersih, pengaturan tata letak bangunan, perosoalan tentang kebakaran.

3. Hingga saat ini berapa persen presentase yang telah dicapai dalam mengurangi pemukiman kumuh ?

Jawab : hasil nya udah 98% karena awal nya luas permukiman kumuh itu 53,31 ha dan sekarang tinggal 9,24 ha. Terus juga awalnya kan ada 5 titik kumuh kayak desa perdamaian, sriwijaya, bukit tempurung, kota kuala simpang, sama kota lintang sekarang tinggal 1 titik yaitu desa kota lintang.

D. Adanya sarana dan fasilitas kerja dalam pelaksanaan program Kotaku

1. Apakah dalam program Kotaku pemerintah memberikan fasilitas yang lengkap sesuai dengan kebutuhan program tersebut ?

Jawab : menurut saya kurag lengkap karena masih ada fasilitas yang kurang untuk turun ke lapangan, kayak kamera untuk dokumentasi hasil kerja ke lapangan itu gak dikasih.

2. Apa saja sarana dan fasilitas yang sudah diberikan pemerintah untuk Dinas Pekerjaan Umum?

Jawab : Sarana dn fasilitas yang dikasih itu cuma mobil sama laptop

3. Apakah sarana dan fasilitas yang telah di berikan oleh pemerintah di gunakan secara efektif dalam melaksanakan program Kotaku ?

Jawab : Yaa udah efektif lah karena itu cuma digunain untuk kegiatan Kotaku aja.

HASIL WAWANCARA

Nama : Edwin Latifurrahman Sahputra, SH
Usia : 50 Tahun
Jabatan : Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-Laki

A. Adanya tujuan dan target sasaran pelaksanaannya pengawasan Internal

1. Faktor apa saja yang melatarbelakangi dilaksanakannya pengawasan internal?

Jawab : Karena adanya laporan bahwa pegawai ada yang melalaikan pekerjaannya dan tidak menyelesaikan sesuai waktu yang ditentukan.

2. Mengapa perlu dilakukan pengawasan internal terhadap pegawai Dinas Pekerjaan Umum ?

Jawab : Agar pegawai melakukan tugasnya dengan baik dan tepat waktu, supaya atasan harus berbuat apa untuk mengatasi masalah yang ada.

3. Bagaimanakah hasil dari pengawasan internal yang dilakukan ?

Jawab : Semenjak dilakukannya pengawasan internal mereka tidak lagi lalai dengan pekerjaannya, gak di tunda-tunda lagi udah lebih baik lah dari sebelumnya.

B. Adanya tata cara (prosedur) dalam pelaksanaan pengawasan internal

1. Bagaimana cara pihak Dinas Pekerjaan Umum melaksanakan pengawasan internal?

Jawab : Caranya biasa di buat pemeriksaan setiap bulan atau di buat rapat untuk memeriksa dokumen atau laporan hasil kerja setiap bulannya.

2. Apakah metode pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum ?

Jawab : Metode nya itulah dilakukan pemeriksaan rutin setiap bulan , rapat setiap bulan terus yang di periksa itu hasil program kerja pegawai, pencapaian target pegawai, kendala dan hambatan yang ada, menilai hasil kegiatan .

3. Apakah ada pedoman khusus untuk melaksanakan pengawasan ?

Jawab : Pedoman khusus ada, itu di terapkan langsung dari peraturan Menteri Pekerjaan Umum jadi kita tinggal ikuti aja.

C. Adanya Pelaksanaan program Kotaku sesuai dengan perencanaannya

1. Apakah program Kotaku sudah terlaksana sesuai dengan yang di rencanakan ?

Jawab : Sudah, sudah berjalan dengan baik walaupun belum 100% yaa .

2. Dalam program Kotaku ini kegiatan apa saja yang diselenggarakan ?

Jawab : Kegiatan nya kayak pembangunan infrastruktur , tapi apa yang mau dibangun itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan dengan desa tersebut.

3. Hingga saat ini berapa persen presentase yang telah dicapai dalam mengurangi pemukiman kumuh ?

Jawab : Berapa persen nya saya kurang tau tapi yang saya tau kawasan kumuh yang tersisa tinggal 9,24 hektar saja.

D. Adanya sarana dan fasilitas kerja dalam pelaksanaan program Kotaku

1. Apakah dalam program Kotaku pemerintah memberikan fasilitas yang lengkap sesuai dengan kebutuhan program tersebut ?

Jawab : Menurut saya sudah lengkap ya karena kayak nya gak memerlukan banyak sarana dan fasilitas.

2. Apa saja sarana dan fasilitas yang sudah diberikan pemerintah untuk Dinas Pekerjaan Umum?

Jawab : Sarana dan fasilitas yang dikasih itu mobil sama laptop.

3. Apakah sarana dan fasilitas yang telah di berikan oleh pemerintah di gunakan secara efektif dalam melaksanakan program Kotaku ?

Jawab : Sudah

HASIL WAWANCARA

Nama : M.Husen Daud

Usia : 47 Tahun

Jabatan : Kepala Desa Kampung Perdamaian

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Laki-Laki

A. Adanya tujuan dan target sasaran pelaksanaannya pengawasan Internal

1. Menurut bapak apa tujuan dilakukannya pengawasan dari Dinas Pekerjaan Umum terhadap program Kotaku yang sedang berjalan sekarang ?

Jawab : Agar program ini berjalan dengan baik sesuai target dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

2. Menurut bapak apa perlu pengawasan itu dilaksanakan ?

Jawab : Sangat perlu, karena setiap pekerjaan atau program itu harus dilakukan pengawasan karena kalau ada pengawasan program tersebut akan berjalan dengan teratur.

3. Menurut bapak bagaimana hasil dari pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum ?

Jawab : Pengawasan yang telah dilakukan oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum bidang Cipta Karya sudah maksimal dan pihak Dinas Pekerjaan Umum sudah mulai rutin melakukan pengawasan langsung ke lapangan dari pada sebelumnya.

B. Adanya tata cara (prosedur) dalam pelaksanaan pengawasan internal

1. Menurut sepengetahuan ibu bagaimana cara Dinas Pekerjaan Umum melakukan pengawasan terhadap program Kotaku?

Jawab : Pengawasan yang dilakukan pihak Dinas Pekerjaan Umum bidang Cipta Karya adalah dengan cara turun langsung ke lapangan dan melihat bagaimana hasil kerja yang

telah di peroleh oleh pihak desa dan melihat hasil pengeluaran keuangan yang di pergunakan untuk kebutuhan pelaksanaan program Kotaku.

2. Apa saja yang sudah dilakukan oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum terhadap program Kotaku ?

Jawab : Yang dilakukan pihak Dinas Pekerjaan Umum mereka sering mengadakan rapat untuk memberikan arahan kepada pihak desa terhadap pelaksanaan program Kotaku.

3. Bagaimana peran Dinas Pekerjaan Umum dalam melakukan pengawasan terhadap program Kotaku ?

Jawab : Peran Dinas Pekerjaan Umum adalah sebagai penggerak dalam pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman daerah berdasarkan kebutuhan masyarakat dan sasaran yang ingin dicapai.

C. Adanya Pelaksanaan program Kotaku sesuai dengan perencanaannya

1. Sejak kapan program ini berlangsung di Kabupaten Aceh Tamiang ?

Jawab : Sejak bulan april 2017.

2. Apakah program Kotaku sudah berjalan sesuai dengan yang di rencanakan ?

Jawab : Pelaksanaan program Kotaku di desa perdamaian sampai saat ini sudah berjalan dengan lancar bahkan untuk tahun 2019 ini desa perdamaian sudah tidak lagi termasuk ke dalam kriteria permukiman kumuh.

3. Apa saja yang sudah di hasilkan selama pelaksanaan program Kotaku ini berlangsung ?

Jawab : Yang sudah dihasilkan selama pelaksanaan program ini berlangsung terlihat nyata seperti saluran air seperti parit yang dibangun sehingga sekarang tidak lagi terjadi banjir jika sedang hujan dan dengan dibangunnya paving blok membuat akses jalanan menjadi baik dan tidak ada lagi lubang-lubang di jalan.

D. Adanya sarana dan fasilitas kerja dalam pelaksanaan program Kotaku

1. Apakah pemerintah sudah memberikan sarana dan fasilitas sesuai dengan yang di butuhkan ?

Jawab : Pemerintah tidak memberikan fasilitas tetapi pemerintah hanya memberikan dana dari APBN kepada kepala desa untuk pelaksanaan program Kotaku tersebut.

2. Dalam bentuk apa saja sarana dan fasilitas yang di berikan oleh pemerintah untuk terlaksananya program Kotaku ?

Jawab : Tidak ada sarana atau fasilitas, semua kita beli sendiri dengan uang yang telah diberikan pemerintah.

3. Apa yang dilakukan pemerintah setelah memberikan sarana dan fasilitas agar digunakan secara efektif

Jawab : Mereka membuat rapat untuk memberitahu kepada pihak desa agar dana yang diberikan digunakan sebaik-baiknya.

HASIL WAWANCARA

Nama : Mustika

Usia : 35 Tahun

Jabatan : KSM pelaksanaan program Kotaku di desa perdamaian

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Perempuan

A. Adanya tujuan dan target sasaran pelaksanaannya pengawasan Internal

1. Menurut ibu apa tujuan dilakukannya pengawasan dari Dinas Pekerjaan Umum terhadap program Kotaku yang sedang berjalan sekarang ?

Jawab : Untuk selalu mengawasi pengerjaan, pembangunan yang dilakukan oleh warga

2. Menurut ibu apa perlu pengawasan itu dilaksanakan ?

Jawab : Sangat perlu dilakukan karena suatu pekerjaan yang diselenggarakan dalam target yang ditentukan

3. Menurut ibu bagaimana hasil dari pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum ?

Jawab : Sampai saat ini hasil pengawasan yang dilakukan oleh pihak Dinas Pekerjaan

Umum sudah baik dan mereka sudah melakukan tugas mereka yang seharusnya.

B. Adanya tata cara (prosedur) dalam pelaksanaan pengawasan internal

1. Menurut sepengetahuan ibu bagaimana cara Dinas Pekerjaan Umum melakukan pengawasan terhadap program Kotaku?

Jawab : Dengan cara turun langsung ke lapangan untuk mengecek hasil kerja yang dilakukan oleh masyarakat dan pihak desa.

2. Apa saja yang sudah dilakukan oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum terhadap program Kotaku ?

Jawab : Mereka sering melakukan rapat untuk memberi arahan kepada pihak desa tentang program Kotaku ini.

3. Bagaimana peran Dinas Pekerjaan Umum dalam melakukan pengawasan terhadap program Kotaku ?

Jawab : Peran mereka sebagai pengawas sekaligus pelaksana program ini ya kayak nya.

C. Adanya Pelaksanaan program Kotaku sesuai dengan perencanaannya

1. Sejak kapan program ini berlangsung di Kabupaten Aceh Tamiang ?

Jawab : Sejak bulan april 2017.

2. Apakah program Kotaku sudah berjalan sesuai dengan yang di rencanakan ?

Jawab : Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

3. Apa saja yang sudah di hasilkan selama pelaksanaan program Kotaku ini berlangsung ?

Jawab : Hasil nya kayak sekarang udah dibangun parit, paving blok juga sudah di sediakan bak sampai di setiap dusun dan gang.

D. Adanya sarana dan fasilitas kerja dalam pelaksanaan program Kotaku

1. Apakah pemerintah sudah memberikan sarana dan fasilitas sesuai dengan yang di butuhkan ?

Jawab : Pemerintah tidak ada memberikan sarana atau fasilitas apapun pemerintah hanya memberikan dana APBN saja yang digunakan untuk pelaksanaan program Kotaku.

2. Dalam bentuk apa saja sarana dan fasilitas yang di berikan oleh pemerintah untuk terlaksananya program Kotaku ?

Jawab : Fasilitas dan sarana kita beli sendiri pakai dana yang dikasih pemerintah.

3. Apa yang dilakukan pemerintah setelah memberikan sarana dan fasilitas agar digunakan secara efektif

Jawab : Setelah memberikan dana mereka mengadakan rapat untuk mengingatkan agar dana tersebut di gunakan seperlunya dan sebaiknya.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTAR
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website: http://www.umsu.ac.id E-mail: rektor@umsu.ac.id

PERMOHONAN-PERSETUJUAN
 JUDUL SKRIPSI

Sk-1

kepada Yth.
 Bapak/Ibu Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara
 SIP UMSU

Medan, 1 - Desember - 2019

Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UMSU :

Nama lengkap : Nona Sinta
 NPM : 1503100075
 Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
 Tabungan sks : 130 sks, IP Kumulatif 3.39

mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

Judul yang diusulkan	Persetujuan
Efektivitas Pelaksanaan Pelaksanaan (Fungsional) Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kantor Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang	✓
Pengaruh TPP (Tambahan Pencharikan Pesawari) Terhadap Kinerja Pegawai di Kantor Kecamatan Kuta Kuala Simpang	
Pengaruh Mutasi Jabatan Terhadap Peningkatan Prestasi Pegawai di Kantor Badan Pengelola Keusnsan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
 Daftar Kemajuan Akademik Mahasiswa (DKAM) yang dikeluarkan oleh Dekan.
 Tanda bukti Lunas Uang/Biaya Seminar Proposal;*)

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Jurusan :
 ruskan kepada Dekan untuk
 tapan Judul dan Pembimbing.

Pemohon,

Medan, tgl. 1 - Desember - 2019

10.007

(Nona Sinta)

Ketua

pembimbing
 Dr. Arifin Suleh



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Terpercaya

agar disebutkan

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING**

Nomor : 10.007/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2019

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Nomor: 15/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018 dan rekomendasi Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara tertanggal : **01 Desember 2018** dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut :

Nama mahasiswa : **NONA SINTIA**
NPM : **1503100075**
Program Studi : **Ilmu Administrasi Publik**
Semester : **VII (Tujuh) Tahun Akademik 2018/2019**
Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) DI KANTOR DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN ACEH TAMIANG**
Pembimbing : **Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.**

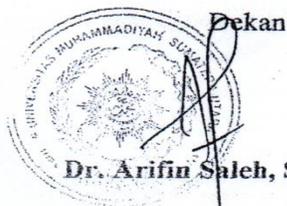
Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan yang berpedoman kepada ketentuan sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 975/SK/IL3/UMSU-03/F/2018 Tanggal 15 Rabiul Awwal 1440 H/ 23 November 2018.

Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal : 01 Desember 2019.

Ditetapkan di Medan,
Medan, 08 Jumadil Akhir 1440 H
13 Februari 2019 M

Dekan

Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP.



UMSU

Intelligens | Cerdas | Terpercaya

Untuk surat ini agar disebutkan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> Email: rektor@umsu.ac.id

Nomor : 163/KET/IL3-AU/UMSU-03/F/2019
Lampiran : --
Hal : *Mohon Diberikan izin Penelitian Mahasiswa*

Medan, 10 Jumadil Akhir 1440 H
15 Februari 2019 M

Kepada Yth : **Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tamiang**
di-
Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data penulisan skripsi dalam rangka penyelesaian program studi jenjang Strata Satu (S1), kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama Mahasiswa : **NONA SINTIA**
N P M : 1503100075
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VIII (Delapan) / Tahun Akademik 2018/2019
Judul Skripsi : **EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) DI KANTOR DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN ACEH TAMIANG**

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.
Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan



Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang Kavling H3
Telp. 0641 - 7447014 Fax. 0641-7447013 E-mail : pu_atam@yahoo.com
KARANG BARU - 24476

Karang Baru, 04 Februari 2019

Nomor : 600 / 273
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Balasan Permohonan Izin
Peneitian

Kepada
Yth; Dekan Universitas
Muhammadiyah Sumatera Utara
di
Medan

Menanggapi surat Saudara No. 163/KET/II.3-AU/UMSU-03/F/2019 tanggal 02 Februari 2019
Perihal Permohonan Izin Penelitian , Pada Mahasiswa :

1. Nama : NONA SINTIA
2. NPM : 1503100075
3. Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
4. Semester : VII (Tujuh) / Tahun Akademik 2018/2019
6. Judul Skripsi : EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL
PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) DI KANTOR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

Pada prinsipnya Permohonan Izin Penelitian Pada Dinas Pekerjaan Umur Dan Perumahan
Rakyat Kabupaten Aceh Tamiang kami tidak keberatan untuk menyusun skripsi selanjutnya
supaya mahasiswa yang bersangkutan dapat menyelesaikan program studi jenjang Strata Satu
(S1).

Demikian kami sampaikan , atas perhatiannya dan kerja sama yang baik diucapkan terima
kasih.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Dan Perumahan Rakyat
Kabupaten Aceh Tamiang



Ir. JUNAIDI
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 19601020 199403 1 002



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6510450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-3

PERMOHONAN
 SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Yth.
 Dekan FISIP UMSU

Medan, 20 - Desember - 2019

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UMSU :

Nama lengkap : Nona Sintia
 NPM : 1503100075
 Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Judul Skripsi dan Pembimbing No. /SK/II.3/UMSU-03/F/20..... tanggal dengan judul sebagai berikut :

Keefektifan Pelaksanaan Pengawasan Fungsional Program Kota
 Bersih Kumuh (KOTAKU) di Kantor Inspektorat Kabupaten
 Aceh Tamiang

Sebagai permohonan ini saya lampirkan :

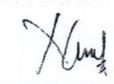
- 1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
- 2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
- 3. DKAM yang telah disahkan;
- 4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir;
- 5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
- 6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
- 7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 5)
- 8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menvetujui :
 Pembimbing

Pemohon,

.....)

()

Program studi : Ilmu Administrasi Negara
 Hari, Tanggal : Kamis, 03 Januari 2019
 Waktu : 08.00 WIB s/d. Selesai
 Tempat : LAB. FISIP UMSU
 Pemimpin Seminar : Naili Khairiah, S.IP, M.Pd

No.	Nama Mahasiswa/Periyaji	Nomor Pokok Mahasiswa	Dosen/Penanggung	Dosen/Pembimbing	Judul/Proposal/Skripsi
1	NONA SINTIA	1503100075	Drs. AHMAD HIDAYAH DALIMUNTHE, M.Si	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.	EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENGAWASAN FUNGSIONAL PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) DI KANTOR INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH TAMIANG
2	ARI ELPIKA	1403100018	MUJAHIDDIN, S.Sos., MSP.H.	Drs. BANGUN NAPITUPULLU, M.Si	IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENGAWASAN DI KECAMATAN MEDAN DELI
3	DWI RIZKY INDRIANI	1503100040	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.	NALILI KHARIRAH, S.IP., M.Pd.	PENERAPAN PRINSIP TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA BAH JOGA UTARA SIMALUNGUN
4	MONICA ZEIN	1503100013	Drs. AHMAD HIDAYAH DALIMUNTHE, M.Si	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., MSP.	EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL DALAM STABILISASI HARGA DI DINAS PENANAMAN MODAL, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN UKM, KABUPATEN BIREUEN
5	MHD. YOPI ILLAHI	1503100091	Drs. BANGUN NAPITUPULLU, M.Si	Drs. AHMAD HIDAYAH DALIMUNTHE, M.Si	PENGARUH PENGAWASAN LANGSUNG TERHADAP KINERJA PECAKAWAI PADA KANTOR DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BINJAI





Inti, Cerdas & Terpercaya
 jawab surat ini agar disebutkan
 in tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6610450
 Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : Nora Sintia
 NPM : 1503100075
 Jurusan : FISIP / Ilmu Administrasi Publik / ~~Rea~~ Konsentrasi - Pembangunan
 Judul Skripsi : Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan Internal Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Aceh Tami

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	14/12/2018	Bimbingan Latar Belakang,	
2.	18/12/2018	Bimbingan Latar Belakang, Rumusan Masalah, dan Uraian Teoritis.	
3.	19/12/2018	Bimbingan Sempro / Menyerahkan Undangan Seminar Proposal.	
4.	3/01/2019	Bimbingan Revisi Setelah Seminar Proposal.	
5.	24/01/2019	Bimbingan Untuk & Daftar Pedoman Wawancara.	
6.	25/01/2019	Bimbingan Revisi Daftar Pedoman Wawancara.	
7.	26/02/2019	Bimbingan Hasil Wawancara dan Pembahasan, Saran, Saran dan Juga Kesimpulan.	
8.	27/02/2019	Bimbingan Keseluruhan Bab II, Bab III, Hasil Penelitian, Pembahasan dan Penutup.	
9.	28/02/2019	ACC Untuk Sidang Meja Hijau.	

Medan, 01 - Maret 2019..

Dekan,

(Dr. Anis Saleh, S.Sos., M.S.P.)

Ketua Program Studi,

(Nahli Khairiah, S.P., M.Ed.)

Pembimbing ke :

(Dr. Anis Saleh, S.Sos., M.S.P.)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Sk-10

UNDANGAN/PANGILAN UJIAN SKRIPSI
 Nomor : 384/UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2019

Pogram Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Hari, Tanggal : Kamis, 14 Maret 2019
 Waktu : 07.45 Wib s.d. selesal
 Tempat : Ruang LAB. FISIP UMSU

No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJUI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
1	NONA SINTIA	1503100075	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP.	EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) DI KANTOR DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN ACEH TAMIANG
2	EVANGELISTA PARDEDE	1503100097	IDA MARTINELLY, SH., MM	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DINA KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BINJAI
3	MAULIDA ULFA	1503100006	Drs. R. KUSNADI, M.AP	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP	IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI DELI SERDANG NOMOR 005 TAHUN 2018 DI DESA PAYA GELI KECAMATAN SUNGGAL KABUPATEN DELI SERDANG
4	PUTRI LESTARI	1503100142	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	MUJAHIDDIN, S.Sos., M.SP	Drs. R. KUSNADI, M.AP	EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN DI DINAS PEKERJAAN UMUM ACEH TENGGARA
5	RAFIKA DURI	1503100063	IDA MARTINELLY, SH., MM	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP.	FUNGSI KOORDINASI VERTIKAL DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERENCANA (KB) DI KECAMATAN BINJAI KOTA

Notulis Skripsi :

1.

Ditetapkan oleh :



DR. NUR ARIFIN SALEH, SH, M.Hum IV

Medan, 04 Ralab 1440 H
 11 Maret 2019 M

Ketua,
 Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Pantia Ujian



Sekretaris

Drs. Zulfahmi, M.I.Kom